

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



**Hairudin La Patilaiya, James Sinurat, Budi Sarasati, Sri Jumiyati,
Asep Supriatna, Budi Harto, Urhuhe, Dena Siburian, Mahaza,
Indah Wahyu Maesarini, Trisnani Dwi Hapsari**

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**Hairudin La Patilaiya
James Sinurat
Budi Sarasati
Sri Jumiyyati
Asep Supriatna
Budi Harto
Urhuhe Dena Siburian
Mahaza
Indah Wahyu Maesarini
Trisnani Dwi Hapsari**



PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penulis :

Hairudin La Patilaiya
James Sinurat
Budi Sarasati
Sri Jumiyati
Asep Supriatna
Budi Harto
Urhuhe Dena Siburian
Mahaza
Indah Wahyu Maesarini
Trisnani Dwi Hapsari

ISBN : 978-623-5383-48-4

Editor : Rantika Maida Sahara, S.Tr.Kes

Penyunting : Aulia Syaharani, S.Tr.Kes

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id

Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya buku "Pemberdayaan Masyarakat" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini menguraikan "Pemberdayaan Masyarakat" secara komprehensif yang terdiri atas 10 bab, yaitu : 1) Konsep pemberdayaan masyarakat 2) Makna, unsur dan tujuan pembangunan, 3) Pembangunan masyarakat sebagai model pembangunan alternatif, 4) Pemberdayaan sebagai inti dari model pembangunan alternatif 5) Model pembangunan konvensional, 6) Faktor pendorong pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat, 7) Hambatan eksternal-kultural proses pemberdayaan masyarakat, 8) Proses perubahan masyarakat, 9) Peran *Change Agent* dan Pemimpin Masyarakat, 10) Swadaya masyarakat.

Penulis berharap buku ini dapat menambah khasanah keilmuan kepada seluruh pembaca dan dapat memenuhi kebutuhan materi belajar mengajar tentang pemberdayaan masyarakat. Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pada kesempatan ini, penulis membuka ruang bagi para akademisi, praktisi, dan para pembaca sekalian untuk memberikan saran, masukan maupun kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua. Aamiin

Penulis, Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I	1
KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	2
1.3 Sejarah Kemunculan Konsep Pemberdayaan Masyarakat.	3
1.4 Peranan Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	5
1.5 Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	8
1.6 Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	9
1.6.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	9
1.6.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	10
1.7 Ciri-Ciri Pemberdayaan Masyarakat	12
1.8 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	15
1.9 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat.....	16
1.10 Indikator Pemberdayaan Masyarakat.....	17
1.11 Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	18
1.12 Jenis Pemberdayaan Masyarakat	18
1.13 Indikator Hasil pemberdayaan Masyarakat.....	19
BAB 2	22
MAKNA, UNSUR DAN TUJUAN PEMBANGUNAN	22
2.1 Pendahuluan.....	22
2.2 Makna Pembangunan.....	24
2.2.1 Makna pembangunan ekonomi.....	27
2.2.2 Makna pembangunan manusia	28
2.2.3 Makna Pemberdayaan Masyarakat.....	29
2.3 Unsur Pembangunan	30
2.3.1 Proses pembangunan.....	30
2.3.2 Sumber daya manusia.....	31
2.3.3 Pendanaan	32
2.3.4 Kemajuan teknologi	32
2.3.5 Pelaku pembangunan.....	33
2.4 Tujuan Pembangunan.....	33
2.4.1 Tujuan pembangunan daerah	35
2.4.2 Tujuan pembangunan nasional	35

2.5 Penutup	36
BAB 3	40
PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI MODEL	
PEMBANGUNAN ALTERNATIF.....	40
3.1 Pendahuluan.....	40
3.1.1 Pembahasan Konsep Pembangunan Masyarakat.....	41
3.1.2 Pembahasan Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat	42
3.1.3 Pembahasan Konsep Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	43
3.1.4 Pembahasan Pembangunan <i>People Centered Model</i>	44
3.1.5 Pembahasan Pembangunan Alternatif dengan Pendekatan Partisipatif	45
3.1.6 Pembahasan Pembangunan Aternatif Berbasis Gotong Royong.....	46
3.2 Studi kasus pemberdayaan perempuan.....	46
3.3 Penutup	48
3.4 Ucapan Terima Kasih.....	48
BAB 4	51
PEMBERDAYAAN SEBAGAI INTI DARI MODEL	
PEMBANGUNAN ALTERNATIF.....	51
4.1 Definisi Pemberdayaan	51
4.2 Konsep Pemberdayaan masyarakat.....	53
4.3 Konsep Pembangunan.....	54
4.4 Paradigma Pembangunan Alternatif.....	56
4.5 Hubungan Pemberdayaan dan Model Pembangunan Alternatif	58
BAB 5	62
MODEL PEMBANGUNAN KONVENSIONAL	62
5.1 Pendahuluan.....	62
5.2 Pembangunan Konvensional	64
5.2.1 Pengertian.....	65
5.2.2 Teori Model Pembangunan Konvensional.....	66
5.2.3 Perkembangan Teori Pembangunan Konvensional.....	68
5.2.4 Kelemahan Model Pembangunan Konvensional	74

BAB 6	77
FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN PROSES	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	77
6.1 Pendahuluan.....	77
6.2 Faktor Pendorong Pelaksanaan Proses	
Pemberdayaan Masyarakat.....	78
6.2.1 Peranan <i>Common Value</i> bagi Pemberdayaan	
Masyarakat.....	78
6.2.2 Peranan <i>Communal Service</i> dalam	
Pemberdayaan Masyarakat.....	79
6.2.3 Peranan Komunikasi Dalam Pemberdayaan	
Masyarakat.....	80
6.3.4 Peranan Kepercayaan Diri Dalam	
Pemberdayaan Masyarakat.....	80
6.3.5 Peranan Informasi Dalam Pemberdayaan	
Masyarakat.....	80
6.2.6 Peranan Kepemimpinan Dalam	
Pemberdayaan Masyarakat.....	81
6.2.7 Peranan Jaringan Dalam Pemberdayaan Masyarakat..	81
6.2.8 Peranan Organisasi Dalam Pemberdayaan	
Masyarakat.....	82
6.2.9 Peranan <i>Skill</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat	83
6.2.10 Peranan <i>Trust</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	83
BAB 7	87
HAMBATAN EKSTERNAL-KULTURAL PROSES	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	87
7.1 Pemberdayaan Masyarakat.....	87
7.2 Faktor- faktor penghambat dan pendorong	
terhadap pengembangan Pemberdayaan Masyarakat.....	88
7.2.1 Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar.....	89
7.2.2 Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi	
yang terlambat	89
7.2.3 Sikap masyarakat yang tradisional	89
7.2.4 Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing.....	90
7.2.5 Adat atau kebiasaan	90
7.2.6 Ketergantungan (<i>depedence</i>).....	90
7.2.7 Superego	90

7.2.8 Rasa tidak percaya diri (<i>self distrust</i>)	90
7.2.9 Rasa tidak aman dan regresi (<i>insecurity and regression</i>)	91
7.2.10 Kesepakatan terhadap norma tertentu (<i>conforming to norms</i>)	91
7.2.11 Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (<i>systemic and cultural coherence</i>)	91
7.2.12 Kelompok kepentingan.	92
7.2.13 Hal yang bersifat sakral (<i>the sacrosanct</i>).	92
7.2.14 Penolakan terhadap orang luar.	92
7.2.15 Kritik terhadap pemberian bantuan.....	92
BAB 8	95
PROSES PERUBAHAN DI MASYARAKAT	95
8.1 Pendahuluan.....	95
8.2 Bentuk Perubahan dalam Masyarakat.....	96
8.3 Macam-macam Perubahan Masyarakat.....	97
8.4 Faktor-Faktor Perubahan Perilaku	99
8.5 Faktor Terjadinya Perubahan Kebudayaan	102
8.6 Contoh perubahan yang terjadi pada Masyarakat yaitu sebagai berikut.....	104
BAB 9	107
PERAN CHANGE AGENT DAN PEMIMPIN MASYARAKAT	107
9.1 Pendahuluan.....	107
9.1.1 Agen Perubahan (<i>Change Agent</i>) dan Pemimpin.....	107
9.1.2 Peran Agen Perubahan Dan Pemimpin Dalam Pemberdayaan Masyarakat	109
9.2 Peran Nyata Pemerintah/Organisasi Masyarakat/ Lembaga Masyarakat Pada Pemberdayaan Masyarakat.....	110
9.2.1 Pemerintah.....	110
9.2.2 Organisasi Masyarakat	110
9.2.3 Lembaga Masyarakat	110
9.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Agen Perubahan dan Kepemimpinan Publik Pemerintah	111
9.4 Penutup	112
BAB 10	115
SWADAYA MASYARAKAT	115
10.1 Pendahuluan.....	115

10.2 Kelompok Swadaya Masyarakat.....	116
10.2.1 Peran Kelompok Swadaya Masyarakat	117
10.2.2 Syarat dan Ciri Kelompok Swadaya Masyarakat.....	118
10.3 Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat.....	119
10.3.1 KSM Sebagai Sarana Perubahan Sosial	120
10.3.2 Kemandirian Kelompok Swadaya Masyarakat	121
BIODATA PENULIS	

BAB I

KONSEP PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Oleh Hairudin La Patilaiya

1.1 Pendahuluan

Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan Pembangunan adalah upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan masyarakat bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang menghadapi praktik partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan di lingkungannya.

Di sisi lain, hampir semua program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya, dimana masyarakat ditempatkan pada posisi strategis yang menentukan keberhasilan program pembangunan. Namun dalam prakteknya pemberdayaan masyarakat sering disalah gunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pemberdayaan masyarakat semerta-merta bukanlah sebagai cara agar masyarakat diharuskan untuk mencari kehidupannya sendiri tanpa hak dan kewajiban dari pemerintah, namun dapat diartikan bahwa masyarakat dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

1.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan modal sosial. Apabila kita sudah memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *knowledge*, modal (*money*), dan *people*. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal sosial dan kekuasaan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005).

Adedokun et al., (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat daripada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Apabila dicermati dari serangkaian literatur tentang konsep pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses

yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

1.3 Sejarah Kemunculan Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment, atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hamper bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, freudianisme, strukturalisme, dan sosiologi kritik Frankfurt School.

Bersamaan dengan itu juga, muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan *civil society*. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran post-modernisme, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.

Diawali pada akhir tahun 1960-an, para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan yang lain seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan di beberapa negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan dan Afrika Selatan yang pencapaian pertumbuhannya tinggi, justru muncul masalah '*maldevelopment*'. Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi kemiskinan dan tidak menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan, bahkan dalam beberapa kasus kesenjangan ekonomi justru meningkat. Pada tahun 1970, sejumlah 944 juta orang, atau 52

persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Data juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran, terutama dibidang pertanian dan peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970-an benar-benar merupakan periode dimana pertumbuhan ekonomi di Negara berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan.

Permasalahan '*maldevelopment*' sebagaimana dijelaskan, memunculkan beberapa pandangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dilandasi oleh paradigma atau cara pandang yang sangat berpengaruh terhadap teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis atas realitas sosial. Teori mencakup empat fungsi dasar yaitu: penjelasan, prediksi, kontrol dan pengelolaan perubahan. Pemberdayaan masyarakat adalah praktek berdasarkan empat fungsi tersebut : menggambarkan kejadian; menjelaskan sebab-sebab kejadian tersebut; memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya (termasuk apa yang akan terjadi apabila dilakukan intervensi atau tidak dilakukan intervensi); dan berusaha untuk mengelola dan mengontrol terhadap perubahan pada semua level aktifitas masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidak berdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak ingin kita lihat, dan apa yang tidak ingin kita ketahui. Paradigma pula yang akan mempengaruhi pandangan seseorang mengenai apa yang 'adil dan tidak adil', baik-buruk, tepat atau tidaknya suatu program dalam memecahkan masalah sosial. Dalam konteks ini, Freire menjelaskan klasifikasi ideologi teori social yang terbagi kedalam tiga kesadaran yaitu: kesadaran magis (*magical consciousness*); kesadaran naif (*naival consciousness*); dan kesadaran kritis (*critical consciousness*).

1.4 Peranan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Dalam kerja sosial, kita dapat menggunakan teori untuk menentukan jenis aksi/kegiatan atau intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi *outcome*/hasil.

1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (*Power-Dependency*)

Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997).

Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya/kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan/modal yang kuat. Selain uang/modal, maka ilmu pengetahuan/*knowledge* dan aspek *people*/sekumpulan orang/massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai *power*. Kelompok yang memiliki *power* maka kelompok itu akan berdaya.

2. Teori Sistem (*The Social System*)

Talcott Parsons (1991) melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Parsons (1991) menyampaikan tiga fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu: (a) Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. (b) Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. (c) Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya.

Teori sistem sosial ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang/massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya.

3. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)

Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu.

Menurut Lubis dan Husaini (1987) bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Pada teori ekologi, membahas tentang organisasi sebagai wadah untuk sekumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama agar tertatur, jelas, dan kuat. Orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan orang/massa yang harus dimiliki kelompok untuk dapat memiliki *power*/daya. Kelompok yang memiliki organisasi dengan kuat dan berkelanjutan maka kelompok ini dikatakan berdaya.

4. Teori Konflik

Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering melahirkan konflik. Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan bukan dari aspek para pelaku konflik tetapi merupakan sesuatu yang *given* dalam interaksi sosial. Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di suatu lingkungan sosial (masyarakat) akan sangat sering menemui konflik. Konflik yang terjadi berkaitan erat dengan ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada

mereka. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan berbagai norma sosial yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Stewart, 2005 dalam Chalid (2005) Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat, pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga penjelasan politik.

5. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Jasper, (2010) menyatakan gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat. Pendekatan pilihan rasional menyadari akan hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan individu sebagai abstrak untuk menjadi realistik. Pragmatisme, feminisme, dan yang terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong lahirnya studi tentang aksi-aksi individu (*individual action*) dan aksi-aksi kolektif (*collective action*) sejak tahun 1960-an, yakni penelitian tentang perlawanan (*social resistance*), gerakan sosial (*social movement*) dan tindakan kolektif (*collective behavior*) berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut. Dua dari mereka di antaranya dipengaruhi oleh pandangan Marxisme, terutama sosiologi makro versi Amerika yang menekankan teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) dan interaksi dengan negara.

Teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/memiliki *power* selain uang, *knowledge* maka *people* juga mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

6. Teori Kontstruktivis (*Constructivist*)

Glaserfeld (1987) menyatakan konstruktivisme sebagai "teori pengetahuan dengan akar dalam "filosofi, psikologi dan *cybernetics*". Von Glaserfeld mendefinisikan konstruktivisme radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima apapun melalui pikiran sehat atau melalui komunikasi. Konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa dengan

untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan mereorganisasikan pengetahuan dengan jalan individual (Windschitl, dalam Abbeduto, 2004).

Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar secara konstruktivis perlu ditanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, kerja keras harus dibangun dan dikonstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (*knowledge*) yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di konstruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

1.5 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding

4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

1.6 Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

1.6.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut para ahli, Tujuan Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri memiliki banyak arti sebagai berikut :

- a. Menurut Wijaya, 2002:77 mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.
- b. Menurut Suryana 2010:19, menjelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.
- c. Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Menurut Mardikanto dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8-10), tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

a. **Perbaikan kelembagaan (*Better institution*)**

Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

b. **Perbaikan Usaha (*Better Business*)**

Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki [bisnis](#) yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

c. **Perbaikan Pendapatan (*Better Income*)**

Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat.

d. **Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)**

Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan [sosial](#) karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. **Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)**

Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

f. **Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)**

Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan masyarakat yang mandiri.

1.6.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikutip dari buku pemberdayaan masyarakat oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:13), adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Ada dua hal yang perlu dikerjakan dalam tahapan ini, yakni penyiapan petugas tenaga pemberdayaan oleh Community Worker dan penyiapan lapangan. Persiapan ini dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dengan lancar.

b. Tahap Pengkajian

Tahap pengkajian atau assessment dapat dilakukan secara individual lewat kelompok-kelompok masyarakat. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasi masalah keputusan dan sumber daya yang dimiliki klien. Ini dilakukan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Dalam tahapan ini, petugas akan berperan sebagai exchange agent atau agen perubahan. Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternative program berikut kelebihan dan kekurangannya. Nantinya, alternative tersebut dipakai untuk menentukan program yang paling efektif

d. Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahap pemformalisasi, agen perubahan membentuk kelompok untuk menentukan program yang bisa mengatasi permasalahan. Petugas juga memformalisasi gagasan tersebut ke dalam tulisan, apabila ada kaitannya dengan pembuatan proposal pada penyandang dana

e. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Dalam tahap implementasi, masyarakat harus memahami maksud, tujuan dan sasaran program untuk menghindari kendala dalam implementasi program. Mereka juga harus bekerja sama dengan petugas.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan. Program ini sebaiknya melibatkan warga untuk membangun komunitas pengawasan internal dan komunikasi masyarakat yang lebih mandiri.

g. Tahap Terminasi

Pada tahapan terakhir, proyek harus berhenti, sebab, masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik. Dengan

kata lain, mereka sudah bisa menjamin kehidupan layak bagi diri sendiri dan keluarga.

1.7 Ciri-Ciri Pemberdayaan Masyarakat

Suatu kegiatan atau program dapat dikategorikan ke dalam pemberdayaan masyarakat apabila kegiatan tersebut terdapat ciri-ciri pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Tokoh atau Pemimpin Masyarakat (*Community Leaders*)

Di sebuah masyarakat apapun, baik pedesaan, perkotaan, maupun pemukiman elit atau pemukiman kumuh, secara alamiah, akan terjadi kristalisasi adanya pemimpin atau tokoh masyarakat. Pemimpin atau tokoh masyarakat (Toma) ini dapat bersifat formal (Camat, Lurah, Ketua RW/RT) maupun informal (Ustad, Pendeta Kepala Adat, dan sebagainya). Pada tahap awal pemberdayaan masyarakat, maka petugas atau provider kesehatan terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan kepada para toko masyarakat. Sebagai petugas atau *provider* kesehatan harus memanfaatkan tokoh masyarakat ini sebagai potensi yang harus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Organisasi Masyarakat (*community organization*)

Dalam suatu masyarakat selalu ada organisasi-organisasi kemasyarakatan, baik formal maupun informal, misalnya: PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, Kelompok-kelompok Pengajian, Koperasi-koperasi, dan sebagainya. Organisasi-organisasi masyarakat ini merupakan potensi yang baru dimanfaatkan dan merupakan mitra kerja dalam upaya memberdayakan masyarakat.

Pengalaman telah membuktikan bahwa posyandu dan polindes yang juga telah menjadi organisasi masyarakat, merupakan wujud kerja sama dari kemitraaan antara Puskesmas, pemerintah setempat, PKK, dan sebagainya. Namun, sayangnya, pertumbuhan posyandu di sebagian besar tampak dipaksakan dari atas (Puskesmas). Hal ini disebabkan karena Dinas Kesehatan atau Puskesmas menargetkannya berdasarkan asumsi jumlah balita yang ada di setiap lingkungan. Seharusnya Posyandu dibentuk bukan

berdasarkan terget dari Puskesmas, tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Demikian pula kegiatan Posyandu pun seragam, terutama isi penyuluhan hanya mencakup gizi, diare, dan keluarga berencana. Seharusnya, khusus isi materi penyuluhan di dasarkan pada masalah setempat.

3. Pendanaan Masyarakat (*Community Fund*)

Dana sehat telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1970-an, mula-mula di Jawa Tengah yang akhirnya meluas di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian dana sehat ini berkembang, dan oleh Depertemen Kesehatan diperluas dengan nama program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). Dengan adanya program JPKM dari pemerintah, dalam hal ini Depertemen Kesehatan, dana sehat yang sebelumnya telah tumbuh dari bawah ini, justru makin hilang dari masyarakat. Sebenarnya baik dana sehat maupun JPKM mempunyai prinsip yang sama yakni “yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin” prinsip ini adalah inti gotong-royong sebagai salah satu prinsip dari pemberdayaan masyarakat seperti telah diuraikan di atas. Disamping dana sehat atau JPKM, pada saat ini diberbagai daerah yang difasilitasi oleh LSM yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan telah dikembangkan berbagai bentuk *Community Fund* antara lain Tabulin (tabungan ibu bersalin), dan Tassia (tabungan suami sayang ibu dan anak). Baik Tabulin maupun Tassia adalah bentuk *community fund* tumbuh dari masyarakat, peranan *provider* atau petugas adalah sebatas memfasilitasi.

4. Material Masyarakat (*Community Material*)

Sumber daya alam adalah salah satu potensi masyarakat. Masing-masing daerah atau tempat mempunyai sumber daya alam yang berbeda, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Di daerah Banjarnegara, ada beberapa desa yang dekat kali dan kali tersebut menghasilkan banyak batu. Dengan bergotong-royong masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa, batu-batu tersebut dapat digunakan untuk pengerasan jalan yang menuju ke fasilitas kesehatan (Puskesmas). Dengan fasilitas jalan yang telah diperkeras

tersebut memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan. Hal serupa terjadi di Pulau Lembah Sulawesi Utara, dengan kekayaan alam batu dan pasir, melalui tradisi “Mapalus” (gotong-royong), terwujudnya rumah sehat bagi seluruh warga. Dengan adanya prestasi di desa ini, WHO memberikan penghargaan (*award*) untuk masyarakat di pulau ini.

Contoh lain terjadi di daerah Purwokerto, di suatu desa yang kekurangan air bersih. Berdekatan dengan desa tersebut ada mata air (*water spring*) yang cukup besar. Oleh pimpinan masyarakat setempat dan memperoleh bantuan teknis dari Universitas Jendral Sudirman, sumber air tersebut dimanfaatkan atau dikelola. Masyarakat setempat diorganisasikan dan bergotong-royong untuk membuat saluran air kerumah-rumah. Saluran atau pipa air yang digunakan adalah berdasarkan teknologi tepat guna, yakni dari bambu yang banyak tersedia di desa tersebut.

5. Pengetahuan Masyarakat (*Community Knowledge*)

Semua bentuk penyuluhan kesehatan kepada masyarakat merupakan contoh pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan komponen pengetahuan masyarakat (*Community Knowledge*). Dalam hal ini kegiatan penyuluhan kesehatan akan bernuansa pemberdayaan masyarakat apabila dilakukan dengan pendekatan *community base health education*. Contoh : lomba membuat poster tentang pesan-pesan kesehatan pada *event* tertentu misalnya hari jadi kota, atau hari kesehatan nasional. Disediakan hadiah bagi pemenang untuk memotivasi para warga setempat. Hasilnya (yang dimenangkan) tidak dikumpulkan, tetapi dipasang di tempat umum, misalnya Posyandu, di balai desa, dan sebagainya. Demikian pula hasil atau setiap pemenang poster pesan-pesan kesehatan yang terpasang akan menjadi sumber pengetahuan masyarakat (*Community Knowledge*).

6. Teknologi masyarakat (*Community Technology*)

Di beberapa komunitas telah tersedia teknologi sederhana yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program kesehatan. Misalnya penyaringan air bersih dengan menggunakan pasir atau arang, untuk pencahayaan rumah sehat menggunakan genteng dari tanah yang di tengahnya ditaruh

kaca, untuk pengawetan makanan dengan pengasapan dan sebagainya. Teknologi-teknologi sederhana yang lahir dari masyarakat ini sebenarnya merupakan potensi untuk pemberdayaan masyarakat. Petugas atau *provider* kesehatan sebenarnya dapat mengadopsi dan memodifikasinya sehingga dapat dimanfaatkan di tempat lain atau diperluas.

Contoh lain adalah penyederhanaan deteksi dini penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dari tanda-tanda teknis medis ke tanda-tanda yang mudah diukur oleh masyarakat, dengan menghitung frekuensi napas. Bila seorang bayi usia 2-12 bulan menderita bentuk pilek napasnya cepat lebih dari 50 kali/menit, anak tersebut menderita pneumonia dan harus dirujuk ke petugas kesehatan. Artinya, di masyarakat tersebut telah tersedia “teknologi tepat guna” untuk mendeteksi penderita pneumonia, sehingga setiap orang dapat melakukannya.

1.8 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai kesuksesan program, terdapat empat prinsip yang harus dipegang, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan dan kemandirian, serta prinsip berkelanjutan.

a. Prinsip Kesetaraan

Dalam proses pemberdayaan, penting untuk mengedepankan kesetaraan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Masing-masing pihak yang terlibat saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman dan dukungan

b. Prinsip Partisipasi

Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif, artinya masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasinya. Tentu saja dalam prosesnya pendamping harus berkomitmen untuk membina dan mengarahkan masyarakat secara jelas.

c. Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip keswadayaan artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan

pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya, mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang. Tujuannya agar pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan masyarakat.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal, pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan, namun secara perlahan peran mereka akan makin berkurang. Sebab masyarakat lah yang diharapkan mampu mengelola kegiatannya sendiri.

1.9 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Adapun untuk beberapa manfaat pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Memberikan partisipasi dan peningkatan kapasitas

Pada dasarnya ketika masyarakat diberdayakan, orang merasa bebas untuk bertindak dan pada saat yang sama mengasosiasikan rasa memiliki terhadap masyarakat tersebut. Hal ini dilakukan melalui partisipasi dan peningkatan kapasitas, orang-orang akan menemukan kembali potensi mereka dan mendapatkan kepercayaan diri. Mereka juga merasa berharga bagi masyarakat, atas bantuan yang mereka berikan-untuk membuat perubahan.

2. Memberikan Inisiasi Tindakan

Kegunaan pemberdayaan masyarakat dapat menginisiasi tindakan di tingkat individu, yang dapat mencapai tingkat masyarakat bahkan nasional. Dalam hal ini misalnya saja seseorang yang menjadi korban kecelakaan, dapat mengumpulkan sekelompok orang untuk bisa jadi teman dekat, keluarga, atau bahkan orang asing yang telah

bergabung untuk tujuan baik dan membantu membuat orang lain peka tentang langkah-langkah keselamatan jalan raya.

3. Pengembangan kelompok kecil

Proses dalam pengembangan kelompok kecil dapat memulai tindakan kolektif. Hal ini juga merupakan sarana bagi praktisi untuk mendapatkan keterampilan pengabdian masyarakat, keterampilan kepemimpinan untuk beberapa keterampilan manajemen, mengembangkan empati, memperluas jaringan, membentuk kemitraan dan mewujudkan kohesi sosial.

4. Menawarkan Penyelesaian Masalah

Menawarkan cara dari berbagai jenis organisasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Itu termasuk kelompok muda, kelompok kepercayaan, dewan komunitas dan asosiasi. Mereka memiliki kekuatan untuk memobilisasi sumber daya.

1.10 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator pemberdayaan masyarakat menurut Widjajanti, 2011:18 keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek yaitu : a. kemampuan dalam pengambilan keputusan, b. kemandirian, dan c. kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan.

Menurut Person at.el 1994:104 mengajukan tiga dimensi indikator keberdayaan yang merujuk pada : a. sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan yang lebih besar, b. sebuah kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, c. pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisi orang-orang lemah dan melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang menekan.

Sedangkan menurut Suhendra 2006:86 terdapat beberapa indikator masyarakat yang berdaya antara lain adalah : a. mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan prana dan sumber –sumber yang ada di masyarakat, b. dapat berjalan „ batton up planning“, c. kemampuan dan aktivitas ekonomi, d. kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, e. kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan. Oleh karena itu, masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

1.11 Sasaran Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang lemah berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial maupun bidang lainnya. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumber daya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan, sehingga tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat yang berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Menurut Tilaar 1999:231 sasaran pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat masyarakat yang hidup di dalam suatu masyarakat madani, masyarakat madani adalah masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupannya yang lebih baik dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya.

1.12 Jenis Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendekatan Dengan Sistem Gagasan.
2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
3. Pondok Bersalin Desa (Polindes)
4. Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD)
5. Lembaga Swadaya **Masyarakat**.
6. Upaya Kesehatan Tradisional.

7. Pos Gizi (Pos Timbangan)
8. Pos KB Desa (RW)

1.13 Indikator Hasil pemberdayaan Masyarakat

Berikut dibawah ini merupakan indikator hasil pemberdayaan masyarakat, yaitu.

1. Input

Meliputi SDM, alat-alat, bahan dan dana yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Proses

Meliputi jumlah penyuluhan yang terlaksana, sebanyak apa pelatihan diadakan, jumlah tokoh masyarakat yang terlibat dan berapa pertemuan terjadi.

3. Output

Seperti jenis usaha dan lembaga kesehatan masyarakat, meningkatkan rasa pentingnya kesehatan bagi masyarakat, jumlah usaha yang ada dimasyarakat dengan tujuan menambah pendapatan keluarga, serta memfasilitasi kendaraan umum bagi masyarakat.

4. Outcome

Masyarakat berperan dalam mengurangi angka kematian, menurunkan frekuensi sakit, angka kelahiran dan mengurangi gizi buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Adedokun, O.M. C.W, Adeyamo, and E.O. Olorunsula. 2010. *The Impact of Communication on Community Development. J Communication, 1(2): 101-105.*
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik. Penebar Swadaya.* Cetakan pertama. Jakarta.
- Chambers, R. 1985. *Rural Development : Putting The Last First.* New York.
- Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work.* London: Grower Publishing Company.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development.* Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Glasserfield, E. (1987). *A Constructivist Approach to Teaching.* In L. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism In Education.* Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. (pp. 3-16).
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice.* Melbourne: Longman.
- Jasper, James M. 2010. *Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?* Graduate Center of the City University of New York.
- Jimmu, M.I. 2008. *Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi.* Africa Development, Vol. XXXIII, No. 2, 2008, pp. 23-3.
- Koentjaraningrat. 2009: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.* Djambangan. Jakarta. Longman.
- Lubis, Hari & Huseini, Martani.1987. *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro.* Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.
- Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan.* Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
- Pearsons, Talcot. 1991. *The Social System.* Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rusmanto, Joni. 2013. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.
- Sadan, Elisheva. 1997. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers.in Hebrew
- Shucksmith, Mark. 2013. *Future Direction in Rural Development*. Carnegie UK Trust. England.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

BAB 2

MAKNA, UNSUR DAN TUJUAN PEMBANGUNAN

Oleh James Sinurat

2.1 Pendahuluan

Pembangunan adalah proses evolusi yang melibatkan peningkatan keadaan atau kondisi tertentu sepanjang waktu. Pembangunan melibatkan peningkatan kualitas mental dan kebahagiaan manusia sepanjang waktu secara terus menerus (Lawn, 2001).

Pembangunan merupakan proses yang mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelum adanya pembangunan. Pembangunan yang direncanakan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan memerlukan proses yang direncanakan sedemikian rupa dengan tahapan pelaksanaan berdasarkan jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Pembangunan memuat berbagai hal tentang pembangunan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mewujudkan masa depan manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara terus menerus dan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Pembangunan harus berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan (*sustainable development*).

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa.

Pembangunan dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku pembangunan agar pembangunan yang direncanakan melalui serangkaian proses dapat diwujudkan dengan baik. Pelaku pembangunan terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang memegang peran penting sebagai regulator yakni yang mengatur dan mengendalikan seluruh rangkaian proses dan tahapan pembangunan. Selain itu pemerintah berperan sebagai simulator yang menyediakan berbagai stimulan untuk mendorong investasi swasta atau masyarakat umum. Pihak swasta sebagai pelaku pembangunan dapat terdiri dari investor asing dan pengusaha swasta dalam negeri. Secara umum diketahui bahwa swasta memegang peranan penting dalam pembangunan karena mereka memiliki modal. Sementara itu, masyarakat dapat juga berperan sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai objek pembangunan.

Jangka waktu pembangunan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Pasal 1 ayat 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pasal 1 ayat 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Pasal 1 ayat 8 Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 1 ayat 9 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penetapan tahapan pelaksanaan pembangunan berkaitan dengan skala prioritas dan ketersediaan dana untuk melaksanakannya.

2.2 Makna Pembangunan

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Kartasasmitha (1997:172) mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang dicapai dengan membangun harkat dan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlu ditekankan disini bahwa pada dasarnya manusia berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahterannya berlandaskan pada kemampuannya dan pengembangan potensi yang dimilikinya.

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (S.P. Siagian, 2012).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Selanjutnya Todaro (2000) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 (tiga) nilai pokok, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*).
- b. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia.
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah kebutuhan dasar (*basic needs*), yakni kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang menyangkut kebutuhan konsumsi individu (makan, perumahan, pakaian), maupun

keperluan pelayanan sosial tertentu seperti air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan dan pendidikan (<http://repository.uma.ac.id>). Pemenuhan kebutuhan dasar dapat terwujud apabila masyarakat berpenghasilan cukup melalui pekerjaan yang mereka miliki. Masyarakat akan berpenghasilan apabila memiliki pekerjaan yang baik. Lapangan pekerjaan tersedia apabila ada berbagai jenis pembangunan yang dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Rasa harga diri (*self esteem*) masyarakat meningkat apabila kebutuhan pokok mereka terpenuhi dengan baik. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok diperlukan dana yang tentu saja diperoleh dari hasil pekerjaan. Lapangan pekerjaan akan tersedia secara luas apabila berbagai program pembangunan yang direncanakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik.

Pembangunan haruslah memanusiakan manusia. Pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu. Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kemampuan untuk memilih (*freedom from servitude*) bagi individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kebebasan dimaksud ditopang oleh keadaan masyarakat yang telah dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal serta didukung oleh rasa harga diri yang semakin meningkat

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai "kehidupan yang serba lebih baik" bagi semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000):

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan

penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Todaro dan Smith (2011, 25-26) menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) komponen dasar atau nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk makna pembangunan yang sesungguhnya. Ketiga nilai inti terdiri dari kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self esteem*), dan kebebasan (*freedom*), sebagaimana diuraikan berikut ini:

Kecukupan. Barang dan layanan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diperlukan untuk menopang kehidupan manusia pada tingkat yang paling minimum.

Harga diri. Perasaan berharga yang dinikmati suatu masyarakat jika sistem dan lembaga sosial, politik, dan ekonominya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kehormatan, martabat, integritas dan kemandirian.

Kebebasan. Situasi yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk memuaskan keinginannya dan setiap orang dapat mengambil pilihan nyata sesuai keinginannya.

Mardikanto dalam Pusut et. al (2017) menyatakan bahwa pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama dengan segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga

masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut

2.2.1 Makna pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Jhingan, M.L., (2016, 41-42) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan syarat. Bagi pembangunan ekonomi, syarat utama adalah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Selanjutnya dikatakan bahwa hasrat atau keinginan untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri.

Pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan kemudian pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebuah negara adalah cara untuk mengurangi tingkat pengangguran, kesenjangan, atau kemiskinan. Pada umumnya istilah pembangunan ekonomi menggambarkan perubahan dalam ekonomi suatu negara yang melibatkan perbaikan kualitatif maupun kuantitatif. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya pada suatu negara.

Kunarjo (2002) mengatakan bahwa pembangunan harus diartikan lebih dari pemenuhan kebutuhan materi di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya dikatakan bahwa pembangunan seharusnya merupakan proses multidimensi yang meliputi perubahan organisasi dari orientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi. Dengan demikian pembangunan adalah perubahan yang meningkat, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi.

2.2.2 Makna pembangunan manusia

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup secara layak (www.bps.go.id).

Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang luas. Ide dasar dari pembangunan manusia adalah menciptakan pertumbuhan yang positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pendekatan pembangunan manusia lebih fokus pada perluasan pilihan masyarakat dengan bebas dan bermartabat. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia (bps.gi.id/publication, 2019).

Selanjutnya, konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM hingga tahun 2010 UNDP melakukan revisi yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini dikenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan indikator melek huruf dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

2.2.3 Makna Pemberdayaan Masyarakat

Hurairah dalam Pusut et. al (2017) menyebutkan bahwa pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Selanjutnya disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Pemberdayaan atau *empowerment* adalah suatu konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan (Kartasasmita, 1997, 176-177). Selanjutnya dikatakan bahwa lapisan masyarakat yang dalam keadaan terbelakang tidak memiliki akses terhadap asset produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki *power*. Pada akhirnya keterbelakangan secara ekonomi membuat mereka semakin jauh dari kekuasaan. Keadaan ini yang diperbaiki dan ditingkatkan melalui pemberdayaan agar kemiskinan dapat dientaskan dan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan.

Kartasasmita (1997) juga mengatakan bahwa pemberdayaan memiliki 2 (dua) tujuan. Tujuan pertama adalah melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Sedangkan tujuan kedua adalah memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Robert Chamber (1995) dalam Kartasasmita

(1997) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini merupakan paradigma baru pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, partisipasi, pemberdayaan dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya. Secara maksimal untuk bertahan untuk mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memanusiakan manusia sehingga harkat dan martabat mereka yang terbelenggu kemiskinan semakin ditinggikan.

2.3 Unsur Pembangunan

Berdasarkan uraian yang disajikan dalam sub bab sebelumnya dapat disimpulkan adanya sejumlah unsur pembangunan. Beberapa di antaranya adalah proses, sumber daya manusia, pendanaan, kemajuan teknologi, dan pelaku pembangunan, sebagaimana diuraikan secara ringkas berikut ini:

2.3.1 Proses pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan maka rangkaian proses perlu dipersiapkan dengan baik. Berbagai proses akan dilalui sebelum pada akhirnya pembangunan dilaksanakan. Secara garis besar, rangkaian proses meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Persiapan meliputi rancang bangun proyek pembangunan dan studi kelayakan pembangunan yang akan sangat menentukan lancarnya pelaksanaan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan merupakan implementasi dari rancang bangun proyek pembangunan. Sementara itu, evaluasi merupakan tahapan penilaian atas pelaksanaan proyek pembangunan. Hasil evaluasi akan dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan lebih lanjut

2.3.2 Sumber daya manusia

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) menekankan bahwa dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Profesionalisme dapat turut membentuk sikap dan perilaku serta kepribadian yang tangguh, sementara kepribadian yang tangguh merupakan prasyarat dalam membentuk profesionalisme. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu: peningkatan kualitas hidup yang meliputi kualitas manusianya seperti jasmani dan rohani, serta kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat, peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) berwawasan lingkungan; serta pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui *SDM yang unggul*, tangguh dan *berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung* pembangunan nasional. *Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas* utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK serta merata di seluruh pelosok tanah air.

2.3.3 Pendanaan

Pembangunan tidak dapat dilaksanakan tanpa pendanaan yang memadai. Instrumen pembiayaan penting untuk dipadukan dengan fase proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, karena instrumen pembiayaan yang sesuai akan membantu kelancaran pembiayaan dan menghindarkan risiko kebangkrutan proyek pembangunan.

Dalam arti luas, pendanaan pembangunan adalah usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (*revenue*), utang (*debt*), dan kekayaan (*equity*) yang bersifat konvensional atau non-konvensional.

Merujuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ada tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Sumber pembiayaan berasal dari Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta masyarakat.

2.3.4 Kemajuan teknologi

Terdapat kaitan atau hubungan yang sangat erat antara kemajuan teknologi dengan pembangunan. Kemajuan teknologi dapat membantu percepatan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, kemajuan teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan. Karena itu, negara harus memastikan penguasaan teknologi di berbagai bidang. Sebagaimana diketahui kemajuan teknologi berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu. Negara harus berinvestasi dalam penguasaan teknologi terkin ini.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya bertumpu pada faktor produksi konvensional seperti penambahan kapital dan tenaga kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Faktor ini akan mendorong suatu negara untuk secara lebih efisien menyediakan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing usaha. Untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi, perhatian harus diberikan pada strategi kebijakan yang mendorong inovasi, termasuk penempatan anggaran negara untuk dialokasikan pada pos Iptek, riset, dan inovasi.

2.3.5 Pelaku pembangunan

Secara garis besar pelaku pembangunan terdiri dari 3 (tiga) kelompok. Kelompok pertama adalah pihak pemerintah. Kelompok kedua adalah pihak swasta. Sementara itu, kelompok ketiga adalah pihak masyarakat.

Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda perlu dilakukan secara terus menerus sebagai penopang utama roda pembangunan. Pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

2.4 Tujuan Pembangunan

Tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Pembangunan merupakan sebuah upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat akan mendorong terjadinya distribusi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Di samping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena eksploitasi yang berlebihan dalam mengejar target

pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan.

Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat telah melalui proses sosial, ekonomi dan lembaga, memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya dikatakan bahwa ada tiga tujuan pembangunan ekonomi, yakni:

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan.
2. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga membutuhkan harga diri individu dan bangsa.
3. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan tergantung kepada orang dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

Berdasarkan tujuan pembangunan sebagaimana disebutkan pada butir 1, 2, dan 3 di atas maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin ketersediaan bahan makanan pokok bagi masyarakat luas, menyediakan tempat tinggal yang layak huni, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai secara berkesinambungan, dan menjamin perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Pemerintah menjamin peningkatan standar hidup yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, menjamin lapangan kerja seluas-luasnya agar masyarakat memiliki pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat menopang kehidupan mereka. Lapangan kerja semakin luas apabila ada berbagai kegiatan

pembangunan secara merata baik meliputi suatu daerah maupun secara nasional.

Fasilitas pendidikan yang dapat mencerdaskan masyarakat harus disediakan oleh Pemerintah. Pada akhirnya, Pemerintah harus membuka jalan untuk perluasan pilihan ekonomi dan sosial agar seluruh lapisan masyarakat terbebas dari kungkungan keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan.

2.4.1 Tujuan pembangunan daerah

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan perencanaan yang berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. (Riyadi dan Bratakusumah, 2004).

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan dapat membangun berbagai variasi kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah tersebut.

Selain itu, tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya secara berkesinambungan. Dengan demikian pembangunan harus dilaksanakan oleh Pemerintah secara berkelanjutan.

2.4.2 Tujuan pembangunan nasional

Seperti dicantumkan pada alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembangunan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social serta mewujudkan cita-cita bangsa.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha

pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional

Pelaksanaan harus melibatkan segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Tentunya didukung oleh masyarakat Indonesia yang mandiri, sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Salah satu dari berbagai tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terus menerus. Dalam kaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang perlu diperhatikan salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya.

2.5 Penutup

Berdasarkan uraian pada Sub Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang makna, unsur dan tujuan pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan mengandung makna sebagai suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
2. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan adalah transformasi sosial, ekonomi, dan budaya.
3. Unsur pembangunan meliputi banyak aspek, beberapa di antaranya adalah:

- a. Proses pembangunan.
 - b. Sumber daya manusia.
 - c. Pendanaan.
 - d. Kemajuan teknologi.
 - e. Pelaku pembangunan.
4. Tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan, dari waktu ke waktu, taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- bps.gi.id/publication, 2019, diunduh 20 April 2022.
<http://repository.uma.ac.id>, diunduh 28 April 2022.
- Jhingan, M. L., 2014, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartasasmita, G, 1997, "Power dan Empowerment: Sebuah Telaah mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat," *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Penyunting: Budhy Tjahjati S. Soegijoko dan BS. Kusbiantoro, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2020, "Membangun SDM Indonesia membangun Sinergitas", <https://www.kemenkopmk.go.id>, diunduh 30 April 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021, "Kemajuan IPTEK untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Inovasi," <https://www.ekon.go.id>, diunduh 30 April 2022.
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia, UI Press.
- Lawn, Philip A., 2001, *Toward Sustainable Development: An Ecological Economics Approach*, International Society for Ecological Economics, Lewis Publishers, Washington, D.C.
- Pusut, R., Marthen Kimbal, dan Michael Mamentu, 2017, "Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso", Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 No. 2, ISSN: 2337-5736
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Siagian. Sondang P., 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi I, Cetakan Ketiga Belas, Bumi Aksara, Jakarta
- Todaro P. Michael, 2000, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jilid I, Jakarta, Penerbit: Erlangga
- Todaro, M.P dan Stephen C. Smith, 2011, *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jilid 2. Penerbit Erlangga Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional”.

www.bps.go.id, diunduh 20 April 2022

BAB 3

PEMBANGUNAN MASYARAKAT SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN ALTERNATIF

Oleh Budi Sarasati

3.1 Pendahuluan

Tulisan ini merupakan lanjutan dari book chapter penulis sebelumnya yang berjudul Pengaruh Aksesibilitas Pada Perubahan Sosial di Daerah Marginal Kampung Sungai Labuh, Desa Pantai Harapan Jaya Kabupaten Bekasi. Pada *Book Chapter* tersebut penulis menceritakan pengalaman terjun di sebuah desa, yang jaraknya hanya 1,5 jam dari Kota Bekasi, namun untuk sampai kesana tidak bisa lancar. Selain system transportasi, infrastruktur desa sangat minim, dan bisa dikatakan tertinggal atau tergolong daerah marjinal. Sehingga hal ini merupakan suatu kondisi yang “luar biasa” menurut penulis. Terlepas dari sebab mengapa desa tersebut kategori marjinal, maka dengan berbekal terpilihnya proposal penulis dan tim mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, oleh Dikti dan LPDP dalam skema Hibah riset Desa tahun 2022, maka kami harus *take action* membangun desa tersebut.

Judul sub bab ini mengarah pada pembangunan masyarakat sebagai model pembangunan alternatif. Namun seharusnya terminologi pembangunan alternatif kurang tepat, karena sudah layaknya pembangunan itu berorientasi pada masyarakat, berbasis peningkatan derajat hidup masyarakat, dari masyarakat yang tertinggal menjadi masyarakat yang maju dan sejahtera. Tolak ukur yang paling peka untuk melihat secara sekilas kemajuan kehidupan masyarakat adalah dari tingkat ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Alur penulisan ini akan membahas pembangunan masyarakat, indikator pembangunan masyarakat, serta

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, studi kasus di Kampung Sungai Labuh, Desa Pantai Harapan Jaya Kabupaten Bekasi.

3.1.1 Pembahasan Konsep Pembangunan Masyarakat

Begitu teori pembangunan yang dibangun oleh para ahli, dimana masing-masing menonjolkan kelebihan teorinya dibandingkan dengan teori lain. Setiap teori pembangunan yang digunakan selalu mengandung kelemahan-kelemahan dalam penerapannya, yang seringkali hal ini tidak disadari oleh pemikir yang bersangkutan.

Pembangunan berorientasi pada masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan, yang menempatkan masyarakat sebagai *centre of attention* (Soetomo, 2006). Secara tata bahasa Indonesia, konsep pembangunan masyarakat dibentuk dari kata "pembangunan" dan "masyarakat". Sehingga konsep pembangunan masyarakat, dapat diartikan pembangunan masyarakat pada hakekatnya adalah kegiatan membangun masyarakat itu sendiri (Indardi, 2016).

Bertumpu pada teori tentang pembangunan masyarakat, penulis akan merujuk pada pengertian pembangunan, menurut dua tokoh, yaitu (Kartasmita, 1996). Menurut Kartasmita pembangunan adalah sebuah kegiatan membangun secara terus menerus menuju kepada kehidupan ke arah yang lebih baik, dengan menggunakan strategi sistematis. Perspektif ilmu sosial mendefinisikan pembangunan sebagai sebuah proses pemberdayaan masyarakat secara terus-menerus sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang optimal (Rahman, 2011).

Bangsa Indonesia menganggap bahwa pokok pikiran dari pembangunan hendaknya mengarah pada cita-cita Nasional, seperti tercantum dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila). Terdapat tiga indikator pembangunan masyarakat, antara lain: kekayaan rata-rata, pemerataan hasil pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Model pembangunan negara-negara di dunia ini, secara umum ada tiga model pembangunan, yakni pembangunan berbasis pada pertumbuhan (*Economic Growth*), pembangunan berbasis

pada kebutuhan dasar (*Basic Needs*) dan pembangunan berbasis pada manusia/masyarakat (*People Centered*).

Paradigma pembangunan yang berfokus pada bidang ekonomi mulai ditinggalkan karena justru menciptakan kesenjangan kehidupan, antara lain: kemiskinan, kejahatan, kesenjangan, dan keterbelakangan (Giddens, 2013). Saat ini paradigma pembangunan mulai bergeser ke arah pemberdayaan masyarakat, artinya pembangunan yang sebelumnya memandang masyarakat sebagai obyek, saat ini menjadi aktor pembangunan berbasis prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan local (Cochrane, 2010).

3.1.2 Pembahasan Konsep Pembangunan Berbasis Masyarakat

Merry (2011), menjelaskan, ada beberapa keunggulan pembangunan berbasis masyarakat, antara lain: 1) pembangunan lebih menekankan pentingnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan; 2). Penerapan akan teknologi tepat guna, berbasis kearifan lokal dan sumber daya masyarakat; 3). Suara masyarakat tentang hak dan kewajiban hasil dari proses pembangunan; 4) *Sustainable development* sebagai alternatif paradigma pembangunan baru; 5. Konsep LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat; 6. Konsep pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan.

Di Indonesia, tantangan pembangunan dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti: kesehatan, lingkungan, dan globalisasi. Tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, harus ada bentuk atau alternatif pembangunan yang harmonis dengan kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Namun perlu diperhatikan lagi tentang kata alternatif. Bukan berarti masyarakat sebagai uji coba, bila menggunakan model pembangunan A gagal lalu beralih ke model B. Tidak demikian.

Pembangunan masyarakat seharusnya menempatkan masyarakat sebagai peran utama/aktor pembangunan dan mulai mengurangi keterlibatan dan intervensi pihak lain seperti LSM maupun pemerintah (Hart, 2013).

3.1.3 Pembahasan Konsep Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seperti telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa konsep pembangunan alternatif muncul akibat dari adanya kelemahan model pembangunan konvensional, yang berfokus pada ekonomi dalam mengatasi *problem-problem* sosial kemasyarakatan kemiskinan.

Awal munculnya ide pengembangan alternatif didasari dari sebuah pemikiran, bahwa masyarakat harus bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan hidup mereka sendiri. Masyarakat diarahkan untuk membangun komunitas pendukung (*supportive communities*). Komunitas pendukung adalah sebuah bangunan kehidupan berdasarkan pada pengembangan dan pembagian sumber daya secara adil, interaksi sosial, partisipatif dan saling mendukung antara anggota masyarakat (Zubaedi, 2013).

Twelvetrees (1991), membagi pendekatan pengembangan masyarakat menjadi 2, yaitu 1) Pendekatan “profesional” dan 2) Pendekatan “radikal”. Pendekatan profesional adalah upaya peningkatan kemandirian dan perbaikan sistem pelayanan sosial. Sementara itu, pendekatan radikal adalah upaya yang berfokus mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial pada pemberdayaan masyarakat marjinal, mencari sebab-sebab dan menganalisis sumber-sumber kelemahan.

Implementasi pengembangan masyarakat seringkali berupa: a) program pembangunan agar anggota masyarakat memperoleh daya dukung untuk memenuhi kebutuhannya. b) kampanye dan aksi sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab (Payne, 1995).

Pada akhirnya, diskusi tentang Pengembangan Masyarakat berpusat pada komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat marjinal, seperti kaum buruh, petani penggarap, para nelayan, kelompok difabel, umumnya tidak berdaya dan tidak memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengontrol sarana-sarana produksi.

Selanjutnya penulis mengarah kepada pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat. Pastinya telah dijelaskan secara

panjang lebar tentang pemberdayaan ini di chapter sebelum maupun sesudah chapter ini.

Istilah pemberdayaan sudah sering di pakai pada setiap topik yang membahas tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan menurut bahasa mempunyai arti sebuah proses atau upaya membuat berdaya masyarakat.

Mubarak (2010), dalam thesis nya menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat, mengartikan sebagai usaha memulihkan, dan kemudian meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat agar mempunyai daya untuk berbuat sesuatu dengan penuh harkat dan martabat mereka.

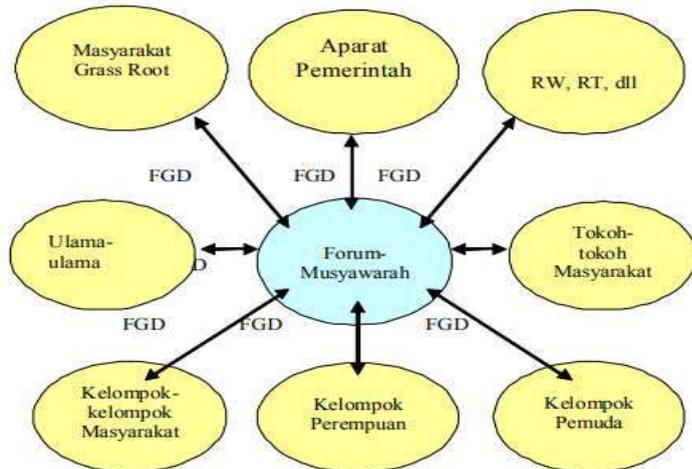
Pemberdayaan lebih menitik beratkan pada aktifitas masyarakat. Apapun potensi baik dari masyarakat selayaknya digali dan diolah, dan kemudian dimanfaatkan untuk kemashlahatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran aktif masyarakat. Pada dasarnya pembangunan alternatif akan selalu menggunakan pendekatan partisipatif.

3.1.4 Pembahasan Pembangunan *People Centered Model*.

Penulis mendapatkan model pembangunan masyarakat model lain, yang disebut sebagai Pembangunan *People Centered Model*, yang terdapat di jurnal ilmiah, oleh (Mahadiansar et al., 2020). Dalam jurnal tersebut diuraikan enam indikator model ini, yaitu : Pemberdayaan, Berfokus pada manusia, Interaksi manusia dengan sumberdaya, Fasilitator, Komitmen dan Kreatifitas, Struktural dan prosedur yang mendukung. Pokok pikiran model ini adalah peningkatan kualitas keikutsertaan masyarakat, persamaan dan pemberdayaan berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Maka dari itu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan.

3.1.5 Pembahasan Pembangunan Alternatif dengan Pendekatan Partisipatif.

Hasil studi (Andriany, 2015), tentang pembangunan alternatif menggunakan pendekatan partisipatif, pada masyarakat yang tergolong miskin. Dia melakukan pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Medan, melalui strategi pemberdayaan komprehensif, mencakup program perlindungan sosial, perbaikan lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan ekonomi produktif. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap, agar mudah dievaluasi dalam setiap tahapannya. Tentu ini tidak bisa memakan waktu yang singkat. Setiap keberhasilan dapat dilihat dari setiap perubahan gerak masyarakat walaupun sedikit. Teknik dalam pendekatan partisipatif yang paling mungkin dilakukan adalah menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD). Di masyarakat FGD sering disamakan dengan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), atau Musyawarah Dusun (Musdus), dan lain-lain.



Gambar 1. Peranan FGD dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif. Sumber : Fardiah (2005)

Pembahasan tentang aplikasi FGD ini akan penulis bahas di sub bab studi kasus. Paparan selanjutnya, penulis akan mengkaitkan pembangunan alternatif dengan Model Pembangunan Dasar menurut (Lund et al., 2013). Menurut Lund, terdapat 5

prinsip model pembangunan kebutuhan dasar yang saling berkaitan satu sama lainnya, antara lain: 1) Pembangunan kapasitas, 2) Mata pencaharian berkelanjutan, 3) Penelitian dalam pembangunan, 4) Manajemen dan admisitrasi, 5) Kesehatan mental masyarakat.

3.1.6 Pembahasan Pembangunan Aternatif Berbasis Gotong Royong

Bila pembaca membaca sub bab di atas, bisa jadi pembaca menganggap tidak ada rujukan dari para pencetus teori pembangunan alternatif. Hampir semua literature yang penulis temui, rujukan para tokoh adalah literatur barat, dimana bisa jadi budaya, karakteristik dan kepribadiannya masyarakatnya berbeda. Maka tidak ada salah nya Penulis mengangkat sub bab ini menjadi satu bahasan tersendiri dan penting.

Para tokoh sosiologi Indonesia sepakat, bahwa ciri paling menonjol masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah Gotong-Royong. Waluyo (2022), menuliskan dalam berita online, bahwa terdapat 28 istilah gotong-royong dalam berbagai bahasa di wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan Modul Tema 5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kemdikbud, Gotong-royong berarti kerja sama, yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan bersama.

3.2 Studi kasus pemberdayaan perempuan

Pada sub bab ini, penulis akan menguraikan pengalaman nyata, saat penulis dan mahasiswa, yang tergabung dalam tim riset hibah desa di Desa Pantai Harapan Jaya Kabupaten Bekasi, tepatnya Kampung Sungai Labuh. Penulis mengambil topik ini, karena data menunjukkan potensi alam di sekitar wilayah ini maupun sumber daya perempuannya memadai, bahkan melimpah. Namun demikian hal ini tidak didukung oleh dukungan sosial dari pemerintah setempat. Saat musibah banjir besar di awal tahun 2020, daerah ini paling akhir dalam mendapatkan bantuan. Hasil wawancara pada ibu-ibu di kedua RT, mereka mengatakan belum pernah sedikitpun mendapatkan pelatihan atau stimulus tertentu, yang berdampak perputaran roda ekonomi masyarakat. Padahal dengan

meningkatnya roda ekonomi, maka akan meningkat pula taraf kehidupan masyarakat.

Penulis mencoba membuat perbandingan dengan tulisan (Andriany, 2015), yang meneliti pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Deli Serdang. Keadaan daerah penelitian penulis ini berada tidak kurang dari 50 km dari pusat kota Bekasi. Hanya saja akses menuju Kampung Sungai Labuh tidak mulus. Masalah aksesibilitas ini sudah penulis bahas di Buku “Dampak Perkembangan Transportasi di Berbagai Sektor”, chapter sektor sosial budaya.

Di satu sisi, kesederhanaan kehidupan masyarakat Kampung Sungai Labuh dan Sungai Kramat mempunyai nilai positif, yaitu mereka mempunyai pemikiran yang murni tentang apa yang sesungguhnya mereka harapkan. Hasil Musyawarah Dusun bersama ibu-ibu, mereka mendambakan diberikan pengetahuan dan ketrampilan mengolah ikan lundu. Sejenis ikan yang sangat berlimpah di sungai yang mengitari desa mereka. Selain itu juga ketrampilan yang nantinya dapat menghasilkan uang. Selanjutnya uang tersebut berguna menopang ekonomi dan kualitas hidup keluarga.

Langkah yang penulis lakukan menggunakan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) secara bertahap, dimulai dengan pamong desa dan tokoh masyarakat, dan kemudian diskusi terarah dengan para ibu. Tampak mereka antusias untuk mengubah kondisi desanya.

Kegiatan diskusi ini memberikan pelajaran pada penulis bahwa, sekalipun itu rakyat kecil yang miskin dan kurang pengetahuan, namun mereka punya “suara” dari hati yang senantiasa ingin disampaikan bila ada kesempatan untuk itu. Yang perlu ditekankan oleh para peneliti, kelompok sukarela (LSM=Lembaga Swadaya Masyarakat), atau pemerintah daerah, bahwa pada saat terjun ke desa tidak serta membawa program yang telah disusun sebelumnya berdasarkan observasi sepihak oleh pihak luar desa. Pihak luar harus mendengar aspirasi atau “suara” rakyat tersebut.

Konsep partisipasi Sastropoetro (1988), yang dikutip oleh (Andriany, 2015), menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut : 1) Konsultasi, 2) Donasi spontan, 3) Proyek Mandiri di luar lingkungan desa, 4) Proyek Mandiri yang

dibiayai seluruhnya oleh komunitas, 5) Sumbangan dalam bentuk kerja oleh tenaga ahli setempat, 6) Aksi masa, 7) Mengadakan pembangunan dikalangan masyarakat desa, 8) Membangun proyek komunitas secara otonom.

3.3 Penutup

Pada akhirnya, pembangunan alternatif berbasis masyarakat menjadi pilihan utama. Ada beberapa keunggulan pembangunan berbasis masyarakat yaitu terdapat kesadaran dari masyarakat akan pentingnya peran dan partisipasi mereka dalam pembangunan. Kesadaran masyarakat ini dapat membentuk konsep pemikiran masyarakat mengenai hak asasi, keadilan dan kepastian hukum selama proses pembangunan berlangsung. Sementara itu, *awareness* ini juga membuat masyarakat memahami karakteristik geografis mereka, agar penerapan teknologi menjadi tepat guna. Hasil akhir dari semua proses tadi adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, serta pelestarian lingkungan terjaga.

3.4 Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini ada karena Penulis memenangkan Hibah Program Riset Keilmuan Tahun 2021, skema Riset Desa. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPDP dan Dikti.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany, D. (2015). *Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup. c.*
- Cochrane, A. (2010). Alternative Approaches to Local and Regional Development. In *In Handbook of local and regional development* (pp. 119–128). Routledge.
- Fardiah, D. (2005). “Focus Group Discussion” dalam Paradigma Pembangunan Partisipatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(1), 95–108. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i1.1180>
- Giddens, A. (2013). *The Third Way and its Critics*. John Wiley & Sons.
- Hart, R. A. (2013). *Children’s Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental Care*. Routledge.
- Indardi. (2016). *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat* (Cetakan Ke). UNPAD Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Tantangan dan Agenda Pembangunan. Makalah Disampaikan Pada Temu Kader Cendekiawan Golkar.*
- Lund, C., Waruguru, M., Kingori, J., Kippen-Wood, S., Breuer, E., Mannarathd, S. & Raja, S. (2013). Outcomes of The Mental Health and Development Model in Rural Kenya: A 2-year Prospective Cohort Intervention Study. *International Health*, 5(1), 43–50. <https://doi.org/10.1093/inthealth/ihs037>
- Mahadiansar, Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S. & Aspariyana. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Merry, S. E. (2011). Measuring The World Indicators, Human Rights, and Global Governance. *Current Anthropology*, 52(SUPPL. 3), 83–95. <https://doi.org/10.1086/657241>.
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Universitas Diponegoro.
- Payne, M. (1995). *Social Work and Community Care*. McMillan.

- Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Ibnu Sina Press.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Twelvetrees, A. (1991). *Community Work*. McMillan.
- Waluyo, N. R. D. (2022). 28 Istilah Gotong Royong dalam Berbagai Bahasa. *Detik.Com*.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5887894/28-istilah-gotong-royong-dalam-berbagai-bahasa>
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Edisi Pert). Kencana.

BAB 4

PEMBERDAYAAN SEBAGAI INTI DARI MODEL PEMBANGUNAN ALTERNATIF

Oleh Sri Jumiwati

4.1 Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) berkembang di Eropa sejak abad abad pertengahan. Pemberdayaan merupakan peluang untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang ataupun suatu organisasi dan memberikan kesempatan agar memiliki inisiatif untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemberdayaan merupakan pembagian kewenangan bagi peningkatan pemahaman politis dan kekuatan bagi kelompok yang lemah serta peningkatan pengaruhnya dalam melaksanakan proses serta menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep pemberdayaan menekankan pada kemandirian pengambilan keputusan dalam melindungi kepentingan rakyat berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran social (Amalia dan Syawie, 2015).

Implementasinya konsep pemberdayaan mempunyai 2 (dua) komponen, yaitu: Komponen primer, mencakup proses untuk melimpahkan sebagian kekuasaan kelompok masyarakat atau perseorangan agar memiliki kemandirian. Proses tersebut dilengkapi dengan usaha untuk meningkatkan asset material untuk menunjang keberdayaan mereka dalam organisasi; Kecenderungan sekunder, bertumpu pada proses pemberian stimulan dan memotivasi individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan merupakan suatu konsep yang sejalan dengan perkembangan ide dan budaya masyarakat. Pemahaman konsep pemberdayaan memerlukan upaya pemahaman secara kontekstual terhadap konsep tersebut. Konsep pemberdayaan yang berasal dari Eropa dikenal pada dekade tahun 70-an dan berkembang pada tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an. Konsep

pemberdayaan dikenal dalam aliran Posmodernisme yang selanjutnya menjadi konsep masyarakat sipil. Partisipasi masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan dengan pemikiran bahwa masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan (Warsilah, 2015).

Berdasarkan implementasinya ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu:

- a. Kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi;
- b. Kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Partisipasi masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan dengan pemikiran bahwa masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep pemberdayaan memiliki empat perspektif yaitu:

1. Perspektif Pluralis

Pemberdayaan berdasarkan perspektif pluralis, merupakan suatu kemauan untuk membantu seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu agar dapat bersaing secara mandiri. Caranya dengan membantu mereka melalui pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bisa bersaing secara wajar.

2. Perspektif Elitis

Pemberdayaan berdasarkan perspektif elitis merupakan suatu upaya dengan bergabung dan mempengaruhi, membentuk aliansi, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini

dilakukankarena pada kenyataannya masyarakat kadang tidak berdaya akibat kekuasaan dari para kaum elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi dan parlemen.

3. Perspektif Strukturalis

Pemberdayaan berdasarkan perspektif strukturalis merupakan suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan akan berhasil jika berbagai bentuk ketimpangan struktural dapat minimalisir. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka baik karena alasan kelas sosial, jender, ras atau etnik. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.

4. Perspektif Post-Strukturalis

Pemberdayaan berdasarkan perspektif post-strukturalis merupakan proses penuh dengan tantangan dalam merubah diskursus. Pemberdayaan lebih diarahkan kepada aspek intelektualitas dibandingkan dengan aktivitas atau aksi. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk pengembangan pemahaman terhadap perkembangan teori baru. Selanjutnya, fokus pemberdayaan lebih diarahkan pada aspek pendidikan dan bukan pada aksi.

4.2 Konsep Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kapasitas seseorang atau kelompok masyarakat melalui penggalian kemampuan, kreatifitas, kompetensi, daya pikir serta tindakan yang lebih baik daripada sebelumnya. Pemberdayaan menjadi komponen yang krusial dan wajib dilaksanakan karena sangat mempengaruhi tingkat kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian masyarakat diharapkan akan siap mengikuti perkembangan zaman dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha dalam mengangkat harkat serta martabat golongan masyarakat yang relatif tidak mampu, sehingga dapat bangkit dari ketidakmampuan

dan kemiskinan. Pemberdayaan merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dengan memanfaatkan potensi diri dan berusaha dalam mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi tindakan nyata (Laha dan Dorohungi, 2021).

Menurut Hadiyanti (2008), tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan pribadi-pribadi yang mandiri dan mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyadari potensi yang dimiliki dan lingkungan sekitar dengan baik.
- c. Meningkatkan etos kerja lingkungan yang baik agar dapat tercipta kondisi kerja yang prima dan saling mendukung.
- d. Melatih dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat membuat perencanaan serta pertanggung jawaban terhadap tindakan mereka untuk memenuhi kebutuhannya.
- e. Melatih kemampuan dalam berpikir dan bernegosiasi serta mencari solusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang akan ditemui dalam lingkungan bermasyarakat. permasalahan-permasalahan yang mungkin.
- f. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui upaya peningkatan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat.

4.3 Konsep Pembangunan

Pembangunan bermakna sebagai usaha untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Pembangunan membutuhkan tahapan yang terukur. Tahapan tersebut sebaiknya meliputi berbagai aspek, terutama aspek ekonomi sebagai ukuran kemakmuran materiil. Selanjutnya adalah tahap kesejahteraan dan keadilan sosial. Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu. Dinamika teori pembangunan tersebut mencakup pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Implementasi konsep pembangunan telah membuat perubahan terhadap kondisi kehidupan masyarakat (Margayaningsih, 2016).

Pada sebagian orang, pembangunan telah memberikan kehidupan yang lebih baik bahkan bisa disebut berlebihan, sementara yang lainnya menganggap justru pembangunan membuat hidup mereka lebih sengsara. Oleh sebab itu pembangunan seharusnya dipahami secara dinamis, karena akan selalu ada masalah-masalah baru dengan perspektif dan solusi yang berbeda-beda. Dengan kata lain selalu akan ada solusi atas setiap permasalahan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan akan selalu ada masalah untuk setiap solusi yang diterapkan. Konsep pembangunan terpusat pada rakyat dan menempatkan pemikiran kreatif rakyat sebagai sumberdaya pembangunan yang sangat penting, dengan kesejahteraan material dan spritual rakyat sebagai tujuan utama dari pembangunan.

Pendekatan utama yang paling menentukan pada upaya untuk konsep perencanaan yang berpusat pada rakyat, yaitu: 1) Pendekatan untuk mendukung dan mengembangkan kegiatan-kegiatan swadaya kaum miskin agar bisa mandiri dan berdaya, 2) Pendekatan agar lebih menyadari walaupun sektor modern berperan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional merupakan pilar utama bagi penghidupan sebagian besar rumah tangga miskin 3) pendekatan untuk menangani kebutuhan akan adanya kelembagaan dalam upaya meningkatkan kemampuan penerima bantuan yang relatif miskin terhadap pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal. Pendekatan pembangunan harus dilakukan dengan inisiatif maupun dorongan terhadap kepentingan rakyat. Dengan demikian rakyat harus mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya sekaligus penguasaan aset infrastruktur (Prawoto *et al.*, 2009).

4.4 Paradigma Pembangunan Alternatif

Pembangunan alternatif merupakan hasil dari kritik atas teori-teori pembangunan yang telah berkembang. Fokus dari pembangunan alternatif tidak hanya pada kritik terhadap teori pembangunan yang sudah ada, tetapi juga berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana paradigma yang cocok dalam membahas pembangunan. Pembangunan alternatif sebagai teori yang masih baru diawali dengan ketidakpuasan terhadap paradigma pembangunan yang ada yang kemudian mengkristal menjadi sebuah alternatif dengan merubah arah pembangunan berfokus pada manusia melalui pendekatan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan alternatif dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu agen, metode dan penilaian pengembangan secara subjektif. Pembangunan alternatif diidentifikasi sebagai proses pembangunan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah (Rusadi, 2014).

Pada awal tahun 1970-an Model Pembangunan Alternatif dikenal sebagai teori yang memiliki konsep yang berbeda dibandingkan dengan konsep-konsep yang sudah ada, antara lain modernisasi dan depedensia. Model Pembangunan Alternatif menjadi konsep yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal serta pertimbangan terhadap keberlangsungan lingkungan alam dalam pembangunan (Jumiyati et al., 2021). Sehingga masalah krisis lingkungan merupakan pembahasan utama dalam pembangunan alternatif. Masyarakat menjadi sangat fokus terhadap upaya meminimalisir krisis lingkungan pada akhir abad ke-20. Penanganan krisis lingkungan berbeda dari waktu ke waktu.

Menurut Cahyani, (2020), pada era 1970-an, perhatian masyarakat lebih fokus terhadap permasalahan krisis sumber daya alam; sedangkan pada era 1980-an lebih fokus terhadap permasalahan perubahan keseimbangan ekologis khususnya masalah pemanasan global dan kerusakan lapisan ozon. Berdasarkan keprihatinan tersebut, maka konsep pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian sebagai proses pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan hidup. Dalam model pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup menjadi setara dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Paradigma pembangunan alternatif terdiri

dari: Berbagai komponen dari struktur pembangunan alternatif sangat berarti, karena paradigma pembangunan alternatif tidak bisa berdiri sendiri. Paradigma pembangunan alternatif terdiri dari:

- a. Berbagai komponen dari struktur pembangunan alternatif sangat berarti, karena paradigma pembangunan alternatif tidak bisa berdiri sendiri. Pembangunan alternatif merupakan kritik terhadap kebijakan yang ada.
- b. Masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan alternatif sehingga realitas yang relevan harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan disusun dari masyarakat sendiri.
- c. Pembangunan alternatif muncul karena tidak ditemukannya dukungan kelembagaan, karena birokrasi tidak dapat mengendalikan ketidakberlanjutan secara prinsip dan praktik.

Pembangunan alternatif merupakan model pembangunan yang bertujuan mengoptimalkan komponen-komponen yang menunjang pemberdayaan, dan menentang komponen-komponen yang memarjinalkan. Konsep pembangunan alternatif pada dasarnya meliputi aspek-aspek antara lain: (1) Adanya ketergantungan terhadap kekuasaan pemerintah; (2) pembangunan tingkat lokal yang bertumpu pada keberadaan budaya lokal dibandingkan dengan mengadopsi sesuatu dari luar, (3) kepemimpinan yang asli dengan mengutamakan pada struktur-struktur yang tidak berdaya dengan tingkat partisipasi yang tinggi oleh penduduk setempat.

Berdasarkan konteks saat ini, pembangunan alternatif memiliki elemen penting sebagai berikut: (1) Peningkatan kesadaran merupakan elemen penentu kegiatan pembangunan, dan (2) Menyadari bahwa pendidikan dan pembangunan dapat terhubung melalui pribadi dan politik. Dengan demikian usaha-usaha pemberdayaan berdasarkan pada pengalaman hidup nyata, penderitaan dan aspirasi penduduk yang diungkapkan oleh mereka sendiri. Pada waktu yang bersamaan pengalaman-pengalaman tersebut harus terhubung dengan kajian terhadap struktur sosial dan ekonomi yang mendalam sebagai penyebab dari penindasan dan kemiskinan (Jumiyati Sri, 2019). Karena segala upaya yang ditunjukkan dalam hubungan pribadi dengan politik sedemikian rupa memungkinkan timbulnya suatu pemahaman sehingga akan

mendukung terjadinya proses pemberdayaan seperti yang diinginkan.

4.5 Hubungan Pemberdayaan dan Model Pembangunan Alternatif

Pada dekade 1950an sampai sekarang, konsep pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang banyak dibicarakan ketika membahas kebijakan pembangunan masyarakat sebagai konsep yang berpusat pada rakyat (*people center development*). Konsep tersebut menempatkan masyarakat dari tingkat komunitas terbawah mendapatkan kesempatan dan tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan dan berperan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan fungsi manajemen dan berhak menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan masyarakat memiliki asumsi mendasar bahwa masyarakat khususnya komunitas lokal sangat memahami apa yang mereka butuhkan dan berhak untuk mengelola proses pembangunannya. Selain memiliki kontrol terhadap pelaksanaan dan pengambilan keputusan tersebut, masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya (Prasetyo dan Asmara, 2012).

Pada dasawarsa 1990-an, pemberdayaan dipahami sebagai “pembangunan alternatif” terhadap model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. Pembangunan alternatif fokus kepada manusia dan lingkungan. Istilah pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dikenal di Indonesia bersamaan dengan istilah pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 51993 yang kemudian dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Selanjutnya, istilah pemberdayaan dan pengentasan-kemiskinan sering digunakan bersamaan sebagai isu utama dalam pembahasan pembangunan. Sehingga kemudian pemberdayaan diasosiasikan sebagai upaya seseorang sebagai individu atau kelompok untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya yang menentukan kualitas hidup secara pribadi atau kolektif (Dwiyanto dan Jemadi, 2013).

Gagasan pembangunan alternatif muncul dalam diskursus pembangunan sebagai reaksi terhadap kegagalan model

pembangunan pro pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi problem kemiskinan, memerhatikan kelestarian lingkungan serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat. Pada dasarnya inti dari kegiatan pemberdayaan adalah adanya partisipasi dari masyarakat sebagai pelaku atau subyek dari pembangunan (*People centered development*).

Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak yang memandang partisipasi masyarakat semata-mata hanya sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar *public relation* agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Partisipasi masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana mencapai tujuan, tetapi juga merupakan tujuan itu sendiri

Pengembangan kapasitas adalah suatu pendekatan pembangunan yang berbasis pada kekuatan-kekuatan lokal secara nyata. Kekuatan-kekuatan tersebut adalah kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya manusia sebagai kekuatan kapasitas lokal yang merupakan dalam pengembangan potensi alam dan ekonomi masyarakat lokal. Model pembangunan alternatif memberikan penekanan pada pentingnya pembangunan yang berbasis masyarakat. Model pembangunan ini didasari oleh upaya untuk pengembangan dan upaya untuk mendorong masyarakat lokal agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang bertumpu pada prinsip keadilan. Pendekatan yang dipakai dalam model ini adalah pembangunan tingkat lokal dengan menyertakan partisipasi orang-orang lokal, sehingga orang lokal dapat mejadi subyek pembangunan di masyarakatnya sendiri dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang telah ada dan berakar di masyarakat desa. Konsep pembangunan alternatif memerlukan pengetahuan tentang masyarakat lokal, dengan mengidentifikasi sumberdaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat lokal (Karsidi, 2001).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D. and Syawie, M. (2015) 'the Development of Rural Resilience With Empowering Concept: a', *Sosio Informa*, 1(2), pp. 175–188.
- Cahyani, F. A. (2020) 'Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Indonesian State Law Review*, 2(2), pp. 168–179.
- Dwiyanto, B. S. and Jemadi, J. (2013) 'Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan', *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 3(1), p. 36. doi: 10.30588/jmp.v3i1.87.
- Hadiyanti, P. (2008) 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif Di Pkbn Rawasari, Jakarta Timur', *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 17(IX), pp. 90–99.
- Jumiyati, S. *et al.* (2021) 'Climate-smart agriculture: Mitigation of landslides and increasing of farmers' household food security', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 708(1).
- Jumiyati Sri (2019) 'Poverty level of farmers based on total income and feasibility of rice farming', *World Journal of Advanced Research and Reviews*.
- Karsidi, R. (2001) 'Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat *)', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1), pp. 115–125.
- Laha, M. S. and Dorohungi, R. (2021) 'Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor', *Jurnal Governance and Politics (JGPP)*, 1(1), pp. 27–36.
- Margayaningsih, D. I. (2016) 'Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan', *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, 9(1), pp. 158–190.
- Prasetyo, A. and Asmara, A. Y. (2012) 'Implementasi Program Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ilmu

- Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek)', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), pp. 123–132.
- Prawoto, N. *et al.* (2009) 'Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya', *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), pp. 56–68.
- Rusadi, U. (2014) 'Makna Dan Model Komunikasi Pembangunan (The Meaning And Model Of Development Communication)', *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 18(1), p. 89.
- Warsilah, H. (2015) 'Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marginal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 17(2), pp. 207–232.

BAB 5

MODEL PEMBANGUNAN KONVENSIONAL

Oleh Asep Supriatna

5.1 Pendahuluan

Pembangunan pada umumnya merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan terencana untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap negara melakukan pembangunan untuk kemajuan negaranya. Pembangunan merupakan sebuah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana dan sadar yang digagas oleh suatu negara demi menuju modernitas dalam upaya pembinaan bangsa. Pada dasarnya pembangunan merupakan sebuah proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan pun hendaknya memperhatikan segala hal yang dianggap penting agar bisa mendukung pada setiap prosesnya.

Kemajuan pembangunan sebuah Negara diidentikan dengan pertumbuhan perekonomian. Sehingga dapat dikatakan Negara maju adalah Negara yang maju perkonomiannya. Pada umumnya mengenai pemikiran dan telaahan tentang ekonomi didasarkan oleh kondisi ruang dan waktu pada negara-negara yang mempunyai struktur perekonomian yang jelas yang mencakup pertumbuhan dan perangkat kelembagaannya. Oleh karena itu perekonomian suatu negara disebut maju apabila sudah memiliki sebuah lembaga permodalan yang mapan, adanya transparansi mekanisme pasar, tidak ada ketimpangan modal antar daerah, dan permasalahan ketenagakerjaan yang sudah berjalan dengan baik.

Dalam hal ini ilmu ekonomi memberikan tumpuan utama terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan sebuah analisis pada tindakan ekonomi, serta kepada segenap sumber daya langka untuk kemanfaatan sebesar-besarnya. Ekonomi pembangunan menyajikan sebuah analisis mengenai proses pertumbuhan dan pendistribusian ekonomi serta dengan memperhatikan pada

mekanisme ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan dalam sektor swasta ataupun pemerintah/publik (Akbar, 2011). Dalam konsep ilmu ekonomi, pembangunan dapat diartikan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dimana sebagian besar masyarakat beralih dari taraf kehidupan yang miskin menuju kehidupan yang lebih baik (Peter Berger, 1997).

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang selain mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan, juga mensyaratkan berlangsungnya serangkaian perubahan secara besar-besaran terhadap struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional (M. P. Todaro, 2000).

Ukuran pokok dari pertumbuhan ekonomi adalah terdapat peningkatan pada *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) dan kenaikan pendapatan perkapita (*Per capita income*). Hal tersebut yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan pada suatu bangsa yaitu adanya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang meningkat. Yang menjadi barometer adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas sebuah Negara pada setiap tahunnya. Dalam istilah ekonomi, produktivitas ini diukur oleh besarnya GNP negara bersangkutan. Berangkat dari struktur ekonomi tersebut, sehingga sebagian negara ada yang dikelompokkan pada kapitalis agraris dan sebagian lainnya dikatakan sebagai kapitalis industrial.

Dengan demikian bahwa suatu bangsa atau Negara dapat dikatakan berhasil melakukan pembangunannya yaitu mereka yang tinggi GNP nya, serta terdapat pemerataan pendapatan atau kesejahteraan yang relatif merata bagi seluruh rakyatnya.

5.2 Pembangunan Konvensional

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk membuat kehidupan masyarakat yang lebih baik (Richard Peet and Elaine Harttwick, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan merupakan sebuah strategi untuk mendorong masyarakat agar mengikuti sebuah proses dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dibanding kehidupan yang sebelumnya.

Kemunculan teori konvensional ini tidak terlepas dari adanya kepentingan kelas kapitalis. Pembangunan model kapitalistis cenderung lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi walaupun tidak jarang mendapat gugatan oleh beberapa ekonom. Sehingga semakin lama semakin banyak para ekonom dan perumus kebijakan meragukan mengenai kemampuan tolok ukur *Gross National Product* (GNP) yang dijadikan sebagai indikator tunggal dalam menciptakan suatu kemakmuran.

Tujuan utamanya bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya melainkan penghapusan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Beberapa ketimpangan dan kelestarian pembangunan dinegara tersebut. Segala bentuk yang dapat menyebabkan munculnya masalah krusial tersebut harus segera diatasi dan dieleminasi sekecil apapun, sehingga pembangunan terus berlangsung dan berkelanjutan (Fuady, 2013).

Bentuk proses evolusi kapital perekonomian pada sebuah negara biasanya berawal dari kapitalisme agraris yang kemudian berubah menjadi kapitalisme komersial dan akhirnya menjadi sebagai kapitalisme industri. Dengan demikian, para ekonom mazhab klasik memberikan perhatian untuk fokus pada pencarian atau identifikasi tentang cara dan teknik mengenai pemanfaatan input produksi penting dalam upaya untuk mendukung proses percepatan pertumbuhan ekonomi. Negara kapitalis agraris yang sedang berproses menuju keadaan yang lebih maju sering dikenal dengan sebutan *development*, yang artinya “pembangunan” atau disebut juga dengan istilah “perkembangan”.

Kebalikan dari teori ini adalah teori *Unconventional*. Teori ini merupakan antithesis atau lawan dari teori pembangunan konvensional yang saat ini sedang mendominasi peradaban di era moderen. Kebalikan dari teori konvensional, bahwa teori-teori yang sejalan dengan pemikiran *unconventional* tentunya tidak menerima pada sistem kapitalisme yang dinggap sebagai sistem masyarakat paling baik, bahkan tidak sedikit yang menolak gagasan-gagasan pencerahan pembentuk peradaban moderen. Walaupun sama-sama tidak menerima sistem kapitalisme sebagai suatu tatanan masyarakat yang ideal, namun teori-teori yang sejalan dengan garis pikir *unconventional* tersebut keduanya tidak seragam.

5.2.1 Pengertian

Pembangunan merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam hal kemajuan atau perkembangan. Ndraha mengatakan bahwa pembangunan sangat erat hubungannya dengan konsep pertumbuhan, kemajuan, perubahan sosial, pembangunan bangsa, pembangunan nasional, rekonstruksi, modernisasi, westernisasi, pembebasan, pengembangan, perubahan *planing* dan pembinaan (Akbar, 2011).

Secara tradisional istilah pembangunan (*development*) dalam perspektif ekonomi, sering diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang pada awalnya keadaan-keadaan ekonomi bersifat tetap jangka waktu yang cukup lama dalam upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP-nya pada tingkat, seumpama 5 persen sampai 7 persen, atau mungkin lebih tinggi lagi, jika hal tersebut memungkinkan (M. P. Todaro, 2000).

Dengan demikian Pembangunan konvensional merupakan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang hanya memperhatikan aspek ekonomi. Pembangunan tersebut diharap dapat mengatasi kemiskinan, menciptakan ekonomi yang maju serta menata pemerintahan yang baik dan dapat mewujudkan masyarakat yang maju yang kreatif dan inovatif. Adapun perbedaan pembangunan konvensional dan pembangunan berkelanjutan adalah jika pembangunan konvensional hanya memperhatikan aspek ekonomi dan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

5.2.2 Teori Model Pembangunan Konvensional

Teori pembangunan merupakan hasil dari pemikiran para pakar teoritis yang memiliki banyak ragam sudut pandang dan merepresentasikan adanya banyak kepentingan. Oleh karena itu, teori pembangunan yang dominan tentunya akan merepresentasikan kepentingan dominan yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Mulai dari Masa pencerahan, dilanjutkan dengan era Revolusi Industri pada prinsipnya teori pembangunan di masyarakat barat lebih didominasi dengan kepentingan kelas dominan yaitu dikuasai kelas kapitalis. Kepentingan kelas dominan ini sering mendapatkan banyak kritikan dari kaum pengkritik sistem kapitalisme. Kritik-kritik tersebut yang pada akhirnya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teori pembangunan.

Richard and Elaine telah membagi teori pembangunan menjadi dua bagian besar, yang salah satunya adalah Teori pembangunan yang dikelompokannya sebagai Teori pembangunan Konvensional. Teori ini ditempatkan sebagai suatu teori yang menerima adanya struktur kapitalisme sebagai sistem terbaik masyarakat. Teori ini menekankan pada pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi. Sedangkan permasalahan yang muncul dari akibat pencapaian tujuan tersebut, hanya dipandang sebagai dampak dari upaya untuk mencapai tujuan itu (Richard Peet and Elaine Hartwick, 2009).

Diantara teori-teori yang mendukung Teori pembangunan konvensional adalah teori ekonomi klasik, Teori Ekonomi neo klasik, Teori modernisasi, Teori keynesian dan teori Neo-liberalisme dan termasuk juga teori Sustainable Development. Meskipun masih tergolong dalam satu garis teori konvensional akan tetapi teori-teori ini tetap saling mengkritik dan sekaligus saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Teori konvensional muncul sebagai hasil dari zaman pencerahan yang telah menciptakan cara berpikir yang rasional dan empiris yang memiliki kontribusi yang sangat besar bagi lahirnya sebuah peradaban yang moderen. Cara berpikir model baru ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki dampak terhadap terjadinya perubahan dalam tatanan

kelas-kelas sosial pada masyarakat barat yang didominasi sebelumnya oleh kelas-kelas bangsawan dan gereja berubah menjadi didominasi oleh kelas-kelas yang mempunyai modal.

Teori-teori ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam memandang sebuah sistem ideal masyarakat. Letak perbedaannya yaitu antara teori-teori yang dipengaruhi oleh pemikiran marxis dan teori lainnya. Teori garis pikir marxis merupakan teori yang mengkritik langsung mengenai dominasi kapitalisme dalam peradaban manusia, hal ini dianggap sebagai suatu sistem ekonomi yang eksploitatif kepada kelas yang tidak memiliki modal, aka tetapi teori ini memiliki kesamaan dengan teori konvensional, yaitu sama-sama berada dalam cara berpikir yang moderen. Teori ini muncul ketika dominasi kapitalisme telah melahirkan dampak yang dinilai buruk bagi masyarakat eropa waktu itu, karena terjadi kesenjangan sosial yang timbul akibat adanya eksploitasi terhadap kaum buruh. Adapun pendekatan analisis yang dipakai oleh teori ini yaitu analisis struktural pada saat menganalisis hubungan-hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat.

Dalam analisis ini perbedaan terhadap penguasaan pada faktor produksi yang menjadi variabel utama yang perlu diperhatikan. Teori ketergantungan merupakan teori pembangunan yang berada pada garis pikir marxis. Sedangkan teori selain itu yang tidak dipengaruhi pemikiran marxis. Teori ini berposisi sebagai teori yang mengkritik peradaban moderen yang dibangun dengan pola pikir yang rasional dan empiris pada masa abad pencerahan. Berdasarkan teori ini bahwa peradaban moderen saat ini belum membawa pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut teori ini beranggapan bahwa Peradaban moderen telah menciptakan sentralisasi kebenaran yang telah menindas terhadap kebenaran lain yang bersebrangan dengan cara berpikir modern. Berdasarkan penganut teori ini hamper semua kebenaran yang ciptakan pada masa peradaban moderen dianggap memberi dampak pada dehumanisasi. Teori Pembangunan yang sejalan dengan teori ini adalah teori Postruktural dan poskolonialisme. Dinamika teori pembangunan, selaian diisi oleh perbedaan garis teori antara *conventional* dan *unconventional* juga diisi dengan permasalahan tentang bagaimana penempatan kaum perempuan dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa munculnya teori pembangunan tidak terlepas dari adanya kepentingan dan konteks sosial yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada era tersebut. Teori *conventional* terlahir sebagai sebuah kritik terhadap feodalisme yang hanya didominasi oleh kaum bangsawan, dan juga sebagai sebuah upaya untuk memperkuat posisi bagi kaum kapitalis.

5.2.3 Perkembangan Teori Pembangunan Konvensional

Istilah pembangunan (*development*) adalah merupakan suatu kapasitas dalam perekonomian nasional dimana keadaan ekonomi yang pada mulanya bersifat tidak tetap pada waktu yang cukup lama dalam upaya untuk menciptakan dan mempertahankan terjadinya kenaikan tahunan pada pendapatan nasional bruto atau GNP (*gross national product*) nya pada level, seumpama 5 persen sampai 7 persen, atau lebih tinggi dari itu jika memungkinkan.

Pandangan-pandangan di atas sebenarnya berlandaskan pada pemahaman pembangunan yang digagas oleh para tokoh aliran ekonomi klasik, diantaranya seperti Adam Smith. Yang mana ajaran intinya adalah *individualisme* dan *laissez faire* yaitu semboyan yang melahirkan semangat individualisme. Smith dalam Tjokroamidjojo pernah mengatakan bahwa sistem individualisme ekonomi adalah menyerahkan pengaturan dan penguasaan ekonomi sepenuhnya kepada masyarakat, sedangkan pemerintah tidak perlu untuk ikut campur tangan (Bintoro Tjokroamidjojo, 1995).

Diantara tokoh-tokoh ekonomi klasik yang populer dalam sejarah pemikiran pembangunan ekonomi yaitu diantaranya Ricardo, Malthus dan Mill. Perbedaan antara ketiganya dalam menganalisis pembangunan ekonomi yaitu terletak pada masalah interpretasi tentang peranan penduduk. Berdasarkan pemikiran Smith dan Mill masyarakat merupakan tenaga produktif yang akan melahirkan adanya perluasan pasar dan perkembangan ekonomi (Bintoro Tjokroamidjojo, 1995). Dengan adanya spesialisasi dan pembagian pekerjaan, maka keterampilan tenaga kerja dan produktiviti tentunya akan semakin meningkat. Dengan demikian, ekonomi akan maju. Sedangkan Ricardo dan Malthus berpendapat bahwa perekonomian akan tidak berkembang jika dilakukan dalam

jangka waktu yang cukup panjang (*stationary state*). Hal tersebut disebabkan karena perkembangan penduduk suatu saat akan melebihi kecepatan perkembangan ekonomi, hal tersebut tentunya akan menurunkan kembali tingkat pembangunan pada taraf yang lebih rendah (Bintoro Tjokroamidjojo, 1995).

Pandangan lain terkait aliran ekonomi klasik yang menarik yaitu pengaruh bukan faktor ekonomi yang diperhitungkan dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut menurut Tjokroamidjojo yaitu kepercayaan masyarakat, adat istiadat, kebiasaan berfikir dan corak-corak institusi yang ada dalam masyarakat (Bintoro Tjokroamidjojo, 1995).

Teori ekonomi pembangunan berikutnya adalah aliran Keynesian. Keynes sendiri sebenarnya tidak membuat analisis terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, perhatian dan teorinya hanya lebih fokus pada situasi jangka pendek yang sedang dialami dunia yaitu seperti depresi pengangguran. Keynes menyatakan dalam bukunya *General Theory* bahwa tiap-tiap pembayaran pasti mempunyai dua sisi. Penghasilan yang diterima oleh seseorang akan beredar berdasarkan sistem ekonomi, hal tersebut merupakan pengeluaran yang akan diterima oleh orang lain (Bintoro Tjokroamidjojo, 1995).

Apabila terjadi sebuah kemunduran dalam edaran penghasilan, yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya bagian-bagian yang disimpan atau disisihkan dari penghasilan dengan berbagai motif tertentu. Penyisihan-penyisihan seperti inilah yang menjadi penyebab adanya gelombang pada seluruh aliran pendapatan. Dalam mempengaruhi gelombang naik turunnya kegiatan seluruh perekonomian, tentunya memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi yaitu seperti kebijakan fiskal dan memberi pengawalan yang bertujuan untuk melepaskan masyarakat dari depresi ekonomi, mendukung investasi, kesempatan kerja dan pendapatan.

Pengembangan teori Keynes pada teori pembangunan yang yaitu teori Harrod-Domar. Analisis dari teori Keynes ini masih dianggap kurang lengkap karena analisis dari teori ini tidak menyentuh pada isu-isu ekonomi dalam jangka panjang. Teori Harrod Domar pada dasarnya memadukan fungsi pembentukan modal dari aliran Klasik ataupun Keynes. Menurut Harrod Domar

dalam Tjokroamidjojo mengatakan bahwa pembentukan modal dipandang berupa pengeluaran yang bisa menambah kesanggupan satu perekonomian dalam menghasilkan suatu barang, dan juga sekaligus sebagai pengeluaran yang dapat menambah permintaan yang efektif dari seluruh masyarakat (Bintoro Tjokroamidjojo, 1995).

Berikutnya adalah Teori ekonomi pembangunan aliran Neo Klassik, teori ini menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh adanya penambahan penawaran dalam faktor-faktor produksi dan kemajuan dalam teknologi. Rasio modal keluaran (*capital output ratio*) tentunya tidak bisa dianggap mudah didapat untuk mengalami perubahan. Ini memiliki dampak bahwa suatu perekonomian akan memiliki banyak kemungkinan yang luas pada saat menentukan penyatuan modal dan tenaga kerja yang digunakan ketika menciptakan sejumlah keluaran tertentu.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, setelah usai perang dunia kedua muncul empat model pertumbuhan yang cukup mendominasi, yang terlahir dari empat aliran pemikiran yang saling bersaing antara satu sama lain. Keempat pemikiran itu adalah (1) beberapa model pertumbuhan linier (2) kumpulan berbagai teori dan pola-pola pada pertumbuhan struktural (3) revolusi ketergantungan internasional (4) kontra revolusi pasar bebas neoklasik. (M.P. Todaro, 2000).

1. Teori model pertumbuhan linier,

Menurut teori ini bahwa peradaban akan berjalan secara linier. Peradaban Negara-negara barat yang pada hari ini terbilang maju bermula dari sebuah kemunduran pada masa-masa kurun silam. Sebenarnya pandangan ini bersandar pada Charles Darwin tentang teori evolusi. Yang beranggapan bahwa peradaban manusia akan terus berjalan secara linier bermula dari keadaan tradisional menuju keadaan baru yang moden. Diantara salah satu tokoh yang mendukung terhadap teori pertumbuhan linier ini yaitu Rostow, teorinya yang dikenal dengan sebutan teori tahapan-tahapan pertumbuhan.

Dalam teorinya ia membagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kedalam lima tahapan yaitu;

- a) tahapan masyarakat tradisional,
- b) tahapan tinggal landas,
- c) tahapan kematangan ekonomi dan,
- d) tahapan konsumsi masal yang tinggi (M.P. Todaro, 2000).

Tokoh lain yang mendukung teori ini adalah Harrod-Domar. Menurutnya untuk memacu sebuah pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya investasi baru yang menjadi suatu tambahan neto untuk dijadikan cadangan atau stok modal.

2. Teori perubahan struktural.

Teori ini lebih fokus pada mekanisme yang memungkinkan untuk mentransformasikan struktur perekonomian bagi negara-negara yang masih tertinggal dari pola pertanian yang subsistem tradisional yang baru mampu hanya untuk mencukupi keperluan sendiri menuju kepada perekonomian yang lebih moden.

Teori perubahan struktural ini dipelopori oleh Hollis B. Chenery, beliau dikenal dari analisis empirisnya *patterns of development* yaitu mengenai “pola-pola pembangunan”, dan W. Arthur Lewis yang mana beliau juga populer dengan model teoritisnya mengenai “surplus tenaga kerja dua sektor (*two sectors surplus labor*)”. W. Arthur Lewis merupakan seorang tokoh ekonom besar sebagai peraih Hadiah Nobel pada era tahun 1950-an dengan model teoritisnya yang terkenal yaitu “*two sectors surplus labor*” atau dalam bahasa Indonesia disebut surplus tenaga kerja dua sektor. Teori ini dikenal sebagai teori umum yang mengupas tentang proses pembangunan pada negara-negara Dunia Ketiga yang telah mengalami banyak penawaran tenaga kerja pada masa dekade tahun 1960-an dan pada awal dekade 1970-an (A. Jajang W. Mahri, 2021).

3. Teori ketergantungan Internasional

Teori ini merupakan sebuah respon terhadap kedua model teori sebelumnya yang hampir sama sekali tidak menunjukkan adanya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi terhadap masyarakat dunia. Model teori ini

memandang bahwa negara dunia ketiga sebagai korban atas kekakuan dari aneka faktor institusi, politik dan ekonomi, baik yang berskala domestik ataupun yang berskala internasional. Hamper semuanya terjebak dalam sebuah perangkap ketergantungan dan dominasi dari negara-negara kaya.

Teori Revolusi Ketergantungan Internasional yang sering disebut juga dengan Teori Dependensia terlahir dari para ekonom negara-negara yang sedang berkembang di Amerika Latin yang dipelopori oleh Paul Baran, beliau menciptakan suatu model dasar keterbelakangan ekonomi yang terjadi di negara sedang berkembang (A. Jajang W. Mahri, 2021). Teori ini, memiliki tiga aliran pemikiran yang utama, diantaranya yaitu: model ketergantungan neokolonial (*neocolonial dependence model*), model paradigma palsu (*falseparadigm model*), dan tesis pembangunan dualistik (*dualistic-development thesis*).

Tesis tersebut secara garis besar menyoroiti bahwa dunia terbagi pada dua kelompok besar, yaitu Negara kaya dan Negara miskin. Pada Negara-negara kaya tentunya akan terdapat sebagian penduduknya yang masih miskin, dan sebaliknya pun sama, pada Negara-negara miskin akan ada segelintir penduduknya yang hidupnya makmur dan sejahtera.

Secara tidak langsung Model neo colonial merupakan hasil pengembangan pemikiran dari kaum Marxis. Model ini menghubungkan antara eksistensi dan keberlangsungan Negara-negara Dunia ketiga terhadap evolusi sejarah hubungan internasional yang terlihat tidak ada keseimbangan antara Negara-negara yang sudah maju dengan Negara-negara yang masih tertinggal atau miskin dalam sstem tatanan kapitalis internasional. Model paradigma palsu berusaha mencoba untuk menghubungkan ketergantungan negra-negara Dunia ketiga terhadap kesalahan-kesalahan dan penempatan sarana yang kurang tepat yang diberikan oleh para pengamat internasional yang berada di bawah naungan lembaga-lembaga bantuan Negara-

negara yang sudah maju dan organisasi-organisasi donor multinasional.

Selanjutnya adalah model kontra revolusional Neoklasik. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi atau jawaban atas kritikan dari teori dependensia yang berpandangan bahwa penyebab keterbelakangan pada negara yang sedang berkembang, karena sebab pengaruh eksternal, terutama pada negara-negara maju. Teori ini juga dikenal sebagai teori neokonservatif atau teori klasik yang dijinakkan, dan juga sering disebut teori neoliberal atau di Indonesia dikenal dengan sebutan aliran atau kelompok neolib yaitu sebuah istilah yang diberikan bagi para ekonom atau pejabat tinggi pemerintah yang pro pasar bebas, pro liberalisasi perdagangan dan pro gobalisasi ekonomi (A. Jajang W. Mahri, 2021).

Menurut Todaro dan Smith, di negara-negara yang sudah maju, pendekatan kontrarevolusi neoklasik berpihak pada kebijakan makroekonomi dari sisi penawaran (*supply-side macroeconomy policy*), teori pengharapan rasional (*rational expectation theory*), dan privatisasi perusahaan negara. Namun di negara yang sedang berkembang, teori kontrarevolusi neoklasik mendesak kehadiran sebuah pasar yang lebih bebas serta tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah melalui badan usaha milik negara, perencanaan statis dan regulasi pemerintah dalam suatu kegiatan perekonomian (Todaro, M. P., & Smith, 2015).

4. Teori Pembangunan Baru

Pada Perkembangan literatur terakhir, paling tidak terdapat tiga teori baru, diantaranya: teori geografi ekonomi baru (*New Economic Geography*), teori pertumbuhan baru (*new growth theory*) dan teori perdagangan baru (*New Trade Theory*) (Kuncoro, 2010).

Teori pertumbuhan bertujuan untuk memperjelas anomaly pada perkembangan arus modal internasional, yaitu memperluas gap antara negara maju dengan berkembang. Potensi terhadap tingkat pengembalian investasi yang relatif tinggi tentunya akan mengalami penurunan karena adanya sistem investasi komplementer, yaitu berupa investasi yang

melengkapi serta memfasilitasi berbagai faktor produktif lainnya, yaitu seperti sumber daya manusia, infrastruktur, serta penelitian dan pengembangan yang sangat rendah. Oleh karena itu, Negara-negara yang termasuk kategori miskin tidak terlalu diuntungkan dari investasi mereka sendiri, dikarenakan pasar bebas akan menghasilkan akumulasi pada modal komplementer yang dianggap kurang optimal (A. Jajang W. Mahri, 2021).

Dengan demikian, teori pertumbuhan endogen menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara menyediakan infrastruktur (barang-barang publik), atau mendorong para investor swasta pada industri padat pengetahuan (*knowledge-intensive industry*) sehingga bisa mengakumulasi modal manusia untuk memperoleh skala hasil yang terus meningkat.

5.2.4 Kelemahan Model Pembangunan Konvensional

Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara konvensional dinilai gagal untuk bertahan dalam menghadapi kemajuan zaman karena hanya berfokus pada seputar modal dan keuntungan saja. Kemungkinan konsep pembangunan hijau yang dapat memberi perhatian besar terhadap lingkungan dan masyarakat sehingga hal tersebut bisa menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil dari model pembangunan konvensional diantaranya yaitu pemerataan dari hasil-hasil pembangunan terjadi ketimpangan dengan kurang lebih 20 persen dari penduduk dunia di negara maju menguasai hampir 80 persen dari pendapatan dunia. Sedangkan 80 persen penduduk dunia yang berstatus sebagai negara berkembang hanya menguasai sekitar 20 persen saja dari pendapatan dunia. Akhirnya pembangunan konvensional terhambat yang disebabkan oleh kondisi sosial dan karena menyusutnya cadangan Sumber Daya Alam (SDA) serta kualitas lingkungan yang memburuk akibat dari pencemaran udara, air, sungai, danau atau waduk, serta terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir ketika di musim hujan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia atau di negara-negara yang sedang

berkembang lainnya dan mungkin juga di negara maju (Iwan Jaya Azis, 2010).

Sejak zaman revolusi industri hingga sekarang, perhatian hanya terfokus pada modal tinggi dan keuntungan. Lingkungan dan sosial dianggap bukan urusan pengusaha. Sejarah telah membuktikan pengabaian masalah lingkungan merupakan penyebab utama terjadinya perubahan cuaca yang dapat mengancam terhadap keberlangsungan industri dan berbagai kegiatan diperusahaan, seperti, banjir, longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Selain itu, pengabaian masalah sosial pun dapat menimbulkan berbagai gangguan, seperti adanya protes dari warga masyarakat yang terganggu, unjuk rasa dari pekerja yang hak-haknya belum dipenuhi, dan hal lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jajang W. Mahri, C. (2021) 'Ekonomi Pembangunan Islam', in S., Muhamad Irfan, Sakti, A. (ed.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, p. 70.
- Akbar, R. (2011) 'ISLAMIC DEVELOPMENT ECONOMY: An Introduction', *Jurnal Madania*, 1(1), pp. 76–91.
- Bintoro Tjokroamidjojo (1995) *Kebijaksanaan Dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan Teori Dan Penerapan*. Jakarta: LPES.
- Fuady, W. (2013) 'Kajian Teori Dan Implementasi Pembangunan Terhadap Tolok Ukur Keberhasilan Pembangunan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Iwan Jaya Azis, dkk (2010) *Pembangunan Berkelanjutan: peran dan kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kuncoro, M. (2010) *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- M. P. Todaro (2000) *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ketu. Edited by Haris Munandar. Jakarta: Erlangga.
- M.P. Todaro (2000) *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara Longman.
- Peter Berger, T. U. (1997) *Revolusi Kapitalis*. Jakarta: LPES.
- Richard Peet and Elaine Hartwick (2009) *Theories of Development contentations, Argumentation, Alternative*. Second Edi. New York: Guiliford Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2015) *Economic Development*. 12th edn. United Kingdom: Pearson Education Limited.

BAB 6

FAKTOR PENDORONG PELAKSANAAN PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Budi Harto

6.1 Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Priyono, 1996), hal tersebut memungkinkan memberdayakan masyarakat melalui peningkatan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat (Sumodiningrat, 1999), serta manusia adalah subjek dari dirinya sendiri (Udin, 2020). Proses pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada proses mendorong kemampuan masyarakat untuk menjadi berdaya, memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau berdaya untuk menentukan pilihan hidup mereka, (Priyono, 1996) ditujukan untuk kelompok atau lapisan masyarakat.

Pemberdayaan berdasarkan aspek psikologis mencakup di dalamnya nilai dan makna, kompetensi, pengaruh, penentuan nasib sendiri, dan kepercayaan diri (Safari, 2010). Pemberdayaan dapat membantu membangun kekuatan individu melalui cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, dan memfasilitasinya. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses negosiasi kekuasaan dengan masyarakat dalam rangka mendapatkan lebih banyak kendali atas kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat terletak pada perubahan status quo, di mana masyarakat merupakan aktor perubahan, bukan hanya penerima perubahan (Luttrell, 2009). Perubahan dapat terjadi dalam berbagai dimensi seperti perubahan sosial, politik atau ekonomi serta perubahan lainnya. Pemberdayaan mendorong masyarakat memperoleh kemampuan membuat pilihan dalam hidup, mengidentifikasi masalah yang

hadapi, untuk mengidentifikasi kebutuhan, dan melihat sumber daya dan kapasitas yang dimiliki untuk mengatasi situasi atau masalah (Melissia Petesque, 2020). Dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi bagaimana memberikan peran aktif dan proporsional pada masyarakat dalam kegiatan sosial (Dessy Rachmawatie, 2021).

6.2 Faktor Pendorong Pelaksanaan Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dua arah (Shannon Mason, 2001) dimana pemberdayaan masyarakat di luar komunitas berhubungan dengan lembaga eksternal dan lingkungan yang lebih luas dalam rangka peningkatan kekuatan atau kontrol masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, pemberdayaan meningkatkan pengaruh atau kontrol terkait dengan masalah dan isu internal yang terjadi di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan dan menghasilkan solusi penggunaan sumber daya lokal.

6.2.1 Peranan *Common Value* bagi Pemberdayaan Masyarakat

Gagasan komunitas berbagi nilai dalam memahami dan mentoleransi nilai dan sikap satu sama lain akan memberikan dampak semakin kuat komunitas dan menghindarkan Rasisme, prasangka dan kefanatikan yang menyebabkan melemahkan komunitas atau organisasi (Bartle, 2004). Melakukan pemberdayaan masyarakat memerlukan banyak waktu dan kerja keras sebanding ketika melihat hasilnya. Dalam memahami pentingnya pemberdayaan masyarakat COGUM Global (Global, 2018) menggambarkan enam nilai inti pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1. Kolaborasi dan inklusi. Pengembangan masyarakat terkait dengan nilai dari inklusi kelompok dan kolaborasi serta kerja tim yang sangat penting agar pengembangan masyarakat berhasil.
2. Partisipasi dan perubahan. Partisipasi dan kontribusi sangat diperlukan dalam menggerakkan masyarakat dalam melakukan perubahan.

3. Rasa Hormat. Saling menghormati antar individu dan masyarakat sangat penting dalam peran solidaritas dan menghormati satu sama lain menuju perubahan sebagai suatu proses.
4. Aset berbasis kekuatan. Pengembangan masyarakat dapat memperkuat kekuatan masyarakat secara keseluruhan.
5. Integritas. Integritas orang-orang yang jujur dan patuh yang menghargai masyarakat dan secara aktif melakukan perubahan positif.
6. Harapan. Perubahan dari individu yang kemudian tumbuh bekerja sama dengan harapan masa depan yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

6.2.2 Peranan *Communal Service* dalam Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitas dan layanan masyarakat seperti jalan, pasar, air minum, akses pendidikan, layanan kesehatan, pemeliharannya, keberlanjutan, dan bagaimana masyarakat memiliki aksesnya. Semakin banyak anggota memiliki akses ke fasilitas komunal yang dibutuhkan, semakin besar pemberdayaan mereka. (Dalam mengukur kapasitas organisasi, ini termasuk peralatan kantor, peralatan, persediaan, akses ke toilet dan fasilitas staf pribadi lainnya, fasilitas kerja, pabrik fisik) (Bartle, 2004).

Program pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan infrastruktur perdesaan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia (Waridin, 2018) terdiri dari: 1) pemberdayaan masyarakat dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, melibatkan peran aktif masyarakat; 2) kegiatan proses maupun pemanfaatannya keberpihakan kepada masyarakat miskin; 3) otonomi dan desentralisasi atas pelaksanaan program dan keberlanjutan infrastruktur; 4) partisipatif masyarakat secara aktif dalam setiap proses aktivitas; 5) kemandirian; 6) program pembangunan terpadu terintegrasi dengan pembangunan; 7) penguatan kapasitas kelembagaan; dan 8) kesetaraan dan keadilan gender.

6.2.3 Peranan Komunikasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Komunikasi menghubungkan masyarakat dengan pihak luar melalui metode elektronik (misalnya telepon, radio, TV, Internet), media cetak (koran, majalah, buku), jaringan, bahasa yang digunakan pada umumnya, literasi, serta kemauan dan kemampuan dalam berkomunikasi (Bartle, 2004).

Peran komunikasi sangat penting untuk pengembangan masyarakat, karena merupakan inti dari setiap aktivitas manusia. Pandangan (Igbokwe, 2009) melalui komunikasi, individu yang terlibat berbagi pengalaman dengan audiens untuk menjelaskan seluruh aktivitas. (Salomon, 1981) berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses dimana orang saling mempengaruhi, menciptakan dan memelihara informasi dan ide yang digunakan. Dengan komunikasi dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait ide, pengalaman, dan data yang dapat memandu dalam upaya pengembangan masyarakat.

6.3.4 Peranan Kepercayaan Diri Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Sikap positif, memiliki motivasi, antusiasme, optimisme, mandiri, mampu memperjuangkan hak-haknya, tidak bersikap apatis dan fatalisme, bagian dari peningkatan dan pengembangan kekuatan masyarakat termasuk peningkatan kepercayaan diri (Bartle, 2004).

6.3.5 Peranan Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kekuatan masyarakat bergantung pada kemampuan dalam memproses dan menganalisis informasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kebijaksanaan di antara individu di dalam kelompok secara keseluruhan. Informasi lebih efektif dan lebih bermanfaat, bukan hanya banyak atau volumenya, tapi bagaimana informasi dapat memberikan kekuatan lebih bagi masyarakat (Bartle, 2004)

6.2.6 Peranan Kepemimpinan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Seorang pemimpin memiliki kekuatan, pengaruh, dan kemampuan dalam menggerakkan masyarakat. Kepemimpinan yang efektif, akan memberikan kekuatan bagi komunitasnya. Dan kepemimpinan demokratis atau partisipatif, berbeda dengan gaya totaliter, otoriter dan diktator, kepemimpinan efektif dan berkelanjutan membantu memperkuat masyarakat, bukan hanya memperkuat para pemimpin tetapi mengikuti keinginan masyarakat secara keseluruhan. Pemimpin harus memiliki keterampilan, kemauan, dan karisma, sehingga semakin efektif kepemimpinan, semakin besar kapasitas yang dimiliki masyarakat atau organisasi (Bartle, 2004).

(Onyx, 2011) menggunakan CLT dalam analisis dan mengidentifikasi tujuh elemen kepemimpinan yang sukses dalam pemberdayaan masyarakat: (1) pemimpin terlibat dalam jaringan formal dan informal masyarakat; (2) pengambilan keputusan melibatkan masyarakat; (3) para pemimpin beraktivitas dalam sistem terbuka, terlibat dengan masyarakat; (4) pemimpin memiliki visi tentang masa depan masyarakat; (5) pemimpin memiliki keterampilan manajemen praktis; (6) pemimpin memiliki perencanaan terkait keberlanjutan; dan (7) pemimpin memiliki komitmen, ketekunan dan energi.

6.2.7 Peranan Jaringan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Bukan hanya "apa yang Anda ketahui", tetapi juga "siapa yang Anda kenal" yang dapat menjadi sumber kekuatan. Sejauh mana anggota masyarakat, terutama para pemimpin, mengenal orang (dan lembaga atau organisasi mereka) yang dapat menyediakan sumber daya yang berguna dalam memperkuat masyarakat secara keseluruhan. Semakin efektif jaringan, semakin kuat masyarakat atau organisasi (Bartle, 2004). Jaringan menghasilkan nilai besar bagi pemberdayaan masyarakat dimana dapat menciptakan ruang bagi orang bertemu rekan-rekan yang berpikiran sama dan berbagi pengetahuan, Ide dan inovasi yang dipupuk oleh koneksi peer-to-peer (Burt, 2021).

Penting untuk ditekankan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya sama, masing-masing memiliki sejarah dan budaya

yang unik, dan membentuk identitas mereka, beragam, dinamis, yang evolusinya dipengaruhi oleh lingkungan. Masyarakat terdiri dari individu, keluarga, kelompok, organisasi dan institusi, baik secara individu maupun kolektif, berkontribusi dan mempengaruhi perkembangan keseluruhan. Keterampilan, keahlian dan pengetahuan yang belum dimanfaatkan, didorong dan dirangsang untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan masyarakat, tetapi juga masyarakat. Pemanfaatan Teknologi yang dapat menopang bentuk-bentuk kegiatan sosial ekonomi atau pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini membantu pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat lokal dapat berhasil dimanfaatkan.

6.2.8 Peranan Organisasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Anggota masyarakat yang berbeda-beda memiliki peran dalam mendukung keseluruhan pemberdayaan masyarakat, termasuk (dalam arti sosiologis) integritas organisasi, struktur, prosedur, proses pengambilan keputusan, efektivitas, pembagian kerja sesuai dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Semakin terorganisir lebih efektif maka masyarakat atau organisasi, semakin memiliki kapasitas atau kekuatan yang dimilikinya (Bartle, 2004).

(Hibbard M, 2004) dalam studi di Vietnam, mengemukakan pentingnya peran organisasi dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Peran organisasi menyeimbangkan sosial, faktor ekonomi dan lingkungan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Peran penting organisasi lainnya LSM adalah desentralisasi pemerintah pusat yang membantu masyarakat daerah memperoleh kekuatan dalam membuat keputusan. Masyarakat local terkadang memiliki kekurangan professional pekerjaan dan sumber daya yang penting. Dalam hal ini peran organisasi membantu penyusunan rencana pembangunan berkelanjutan dalam rangka membantu kebijakan pemerintah pusat. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan masyarakat yang berkelanjutan berorientasi pada proses, dan membutuhkan ekstensif partisipasi masyarakat dan mengandalkan jaringan untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian

6.2.9 Peranan *Skill* Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kemampuan yang dimiliki individu, yang berkontribusi pada masyarakat dan kemampuannya yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan, keterampilan teknis, keterampilan manajemen, keterampilan organisasi, keterampilan mobilisasi dapat membantu pengembangan masyarakat atau organisasi tersebut (Bartle, 2004).

(Smith, 1978) mengemukakan kebutuhan untuk mengetahui keterampilan apa yang dimiliki oleh para profesional pengembangan masyarakat. Menentukan pengetahuan yang unik, keterampilan, dan berorientasi sikap dan nilai pengembangan masyarakat. Pertama, praktisi pengembangan masyarakat membutuhkan keahlian dan berorientasi dan kolaborator masyarakat. Penting untuk mengetahui orientasi dan bidang-bidang keahlian dan yang seharusnya. Kedua, program pendidikan dirancang untuk menghasilkan dan menjaga praktisi profesional up to date. Oleh karena itu, pendidik dan pelatihan untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan orientasi yang dalam kurikulum sebelum pemberdayaan masyarakat.

6.2.10 Peranan *Trust* Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Anggota masyarakat harus memiliki sikap saling percaya, terutama pemimpin dan pelayan masyarakat, karena merupakan cerminan dalam integritas sikap (kejujuran, ketergantungan, keterbukaan, transparansi, kepercayaan) dalam masyarakat. Meningkatnya sikap kepercayaan dan ketergantungan dalam masyarakat mencerminkan peningkatan kapasitasnya dalam menghindari sikap ketidakjujuran, korupsi, penggelapan dan penyelewengan sumber daya dalam masyarakat yang menyebabkan kelemahan masyarakat atau organisasi (Bartle, 2004).

Peran pentingnya kepercayaan dalam upaya keterlibatan pemberdayaan masyarakat tidak dapat diremehkan. Tanpa upaya yang dan konsisten untuk menumbuhkan kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat di setiap aktivitas, bahkan proses keterlibatan yang dirancang dengan baik tidak akan berhasil dalam pemberdayaan. Meskipun ada sejumlah kunci dalam membangun kepercayaan dalam masyarakat mana pun, penting menyadari

bahwa etos ini harus dipahami pada setiap aspek program keterlibatan dalam pemberdayaan masyarakat (Department of Agricultural Economics, 2022). Tantangan saat ini bahwa kita memasuki era menurunnya kepercayaan pada pemerintah dan lembaga dari berbagai negara. Hal tersebut menimbulkan tantangan serius bagi aktivitas pemberdayaan yang ingin melibatkan masyarakat dalam proses diskusi, pengambilan keputusan, dan partisipasi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartle, P. (2004). *Human Factor and Community Empowerment*. Retrieved from Community Empowerment Collective: <http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/emp-hf.htm>
- Burt, H. (2021, September 1). *The importance of networking in community development*. Retrieved from Community Management: <https://zapnito.com/insights/the-importance-of-networking-in-community-development/#:~:text=Networking%20generates%20huge%20value%20for,Nature%20across%20its%20%20communities>.
- Department of Agricultural Economics, S. a. (2022). *The Role and Importance of Building Trust*. Retrieved from Penn State Collage of Agricultural Sciences: <https://aese.psu.edu/research/centers/cecd/engagement-toolbox/role-importance-of-building-trust>
- Dessy Rachmawatie, E. R. (2021). Driving Factors of Community Empowerment and Development through Renewable Energy for Electricity in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, , 11(1), 326-332.
- Global, C. (2018, October 23). *6 Core Values Of Community Development*. Retrieved from COGUM Global: <https://www.cogum-global.org/core-values-community-development/>
- Hibbard M, T. C. (2004). Sustainable Community Development: A Social Approach from Vietnam. *Community Development Society*, 35(2), 87-105.
- Igbokwe, U. &. (2009). *Classroom Management for Curriculum Implementation: Applying Psychological Principles*. Enugu: Timex Publishers.
- Luttrell, C. Q. (2009). *Understanding and Operationalising Empowerment*. London: Overseas Development Institute.
- Melissia Petesque, S. C. (2020). *Community Empowerment Manual*. Italia: Community Empowerment and the CPA.
- Onyx, J. L. (2011). Complex systems leadership in emergent community. *Community Development Journal*, 493–510.

- Prijono, O. P. (1996). *Empowerment: Policy Concepts and Implementation*. Jakarta: Center for Strategic for International Studies.
- Safari, K. R. (2010). The relationship between psychological empowerment and entrapreneurship among clerks of Fars Payame Noor University. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5(2), 798–802.
- Salomon, G. (1981). *Communication and Education: Social and Psychological Interactions*. London: Sage Publications.
- Shannon Mason, J. M. (2001). *Participation for Empowerment*. CARE Librarian.
- Smith, N. L. (1978). Technical Aspects: Assessing Community Developer Performance. *Journal of the Community Development Society*, 9(1), 28-35.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Regional Development and Community Empowerment*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Udin, U. (2020). Renewable energy and human resource development: Challenges and opportunities in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(2), 233-237.
- Waridin, A. D. (2018). Community Empowerment in Rural Infrastructure Development Program. *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(1), 8-14.

BAB 7

HAMBATAN EKSTERNAL-KULTURAL PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh Urhuhe Dena Siburian

7.1 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar yaitu “daya” yang dalam bahasa Inggris disebut “*power*” yang mempunyai arti kekuatan atau kemampuan. Sedangkan arti “pemberdayaan” atau “*empowerment*” adalah suatu perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah (Syarifuddin, Su, 2017). Jadi pemberdayaan adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk membuat menjadi berdaya, yaitu kemampuan untuk dapat melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak berupa akal, ikhtiar atau upaya (Husaini, 2016).

Masyarakat diartikan sebagai sekelompok manusia yang hidup dengan saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat karena adanya suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2013).

Dalam beberapa kajian tentang pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat supaya dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Dalam proses tersebut masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (Syarifuddin, Su, 2017). Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat tersebut ialah keberdayaan masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah kesehatan yang ada di dalam

masyarakat tersebut dan mampu memecahkan masalah tersebut dengan berbagai program yang dibuat secara bersama-sama. (Husaini, 2016). Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak hambatan yang dihadapi oleh fasilitator atau tenaga kesehatan. Hambatan yang sering dihadapi adalah kurangnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat.

Tantangan dan hambatan memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan dan keberlangsungan program promosi kesehatan.

7.2 Faktor- faktor penghambat dan pendorong terhadap pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam prosesnya sering menghadapi berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang dihadapi biasanya adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan ke dalam suatu program yang terpadu. Jika pemberdayaan hanya dipusatkan pada satu dimensi saja, maka pengembangan akan mengabaikan kekayaan dan kompleksitas kehidupan manusia serta pengalaman masyarakat.

Sebenarnya tidak ada alasan bahwa berbagai tindakan untuk memberdayakan masyarakat tidak bisa disinergiskan. Pengembangan masyarakat secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Pemberdayaan bukanlah program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat untuk komunitas.

Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan namun harus diakui juga bahwa ada banyak program pemberdayaan yang berhasil dan

mencapai tujuan yang ditetapkan. kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Kendala-kendala tersebut adalah :

7.2.1 Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan.

7.2.2 Perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang terlambat

Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat.

7.2.3 Sikap masyarakat yang tradisional

Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal, inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan dalam suatu masyarakat.

7.2.4 Prasangka terhadap Hal-hal yang baru atau asing

Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya, semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima.

7.2.5 Adat atau kebiasaan

Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat. Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang mereka bangun dalam masyarakatnya.

7.2.6 Ketergantungan (*depedence*).

Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.

7.2.7 Superego

Superego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan superego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan pula.

7.2.8 Rasa tidak percaya diri (*self distrust*)

Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

7.2.9 Rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*)

Keberhasilan dan “masa-masa kejayaan” yang pernah dialami seseorang cenderung menyebabkan ia larut dalam “kenangan” terhadap keberhasilan tersebut dan tidak berani atau tidak mau melakukan perubahan. Contoh regresi ini adalah: seseorang yang tidak mau mengubah pola pertaniannya karena ia pernah mengalami masa-masa panen yang melimpah di waktu yang lalu. Rasa tidak aman berkaitan dengan keengganan seseorang untuk melakukan tindakan perubahan atau pembaharuan karena ia hidup dalam suatu kondisi yang dirasakan tidak membahayakan dan berlangsung dalam waktu cukup. Contoh rasa tidak aman ini antara lain : seseorang tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut salah, takut malu dan takut dimarahi oleh pimpinan yang mungkin juga menimbulkan konsekuensi ia akan diberhentikan dari pekerjaannya.

7.2.10 Kesepakatan terhadap norma tertentu (*conforming to norms*)

Norma berkaitan erat dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Norma merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis namun mengikat anggota-anggota komunitas. Di satu sisi, norma dapat mendukung upaya perubahan tetapi di sisi lain norma dapat menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan.

7.2.11 Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*)

Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain karena dalam suatu komunitas tidak berlaku hanya satu sistem tetapi berbagai sistem yang saling terkait, menyatu dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan mantap. Sebagai contoh, perubahan sistem mata pencaharian dari ladang berpindah menjadi lahan pertanian tetap akan menimbulkan perubahan pada kebiasaan yang lain seperti pola pengasuhan anak, pola konsumsi dan sebagainya.

7.2.12 Kelompok kepentingan.

Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya pemberdayaan petani di suatu desa tidak dapat dilaksanakan karena ada kelompok kepentingan tertentu yang bermaksud membeli lahan pertanian untuk mendirikan perusahaan tekstil. Kelompok kepentingan ini akan berupaya lebih dulu agar lahan pertanian tersebut jatuh ke tangan mereka.

7.2.13 Hal yang bersifat sakral (*the sacrosanct*).

Beberapa kegiatan tertentu lebih mudah berubah dibandingkan beberapa kegiatan lain, terutama bila kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh : di banyak wilayah, dukungan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dirasakan masih sangat kurang karena masyarakat umumnya masih menganggap bahwa pemimpin adalah laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh agama atau sesuai dengan sistem patriaki.

7.2.14 Penolakan terhadap orang luar.

Anggota-anggota komunitas mempunyai sifat yang universal dimiliki oleh manusia. Salah satunya adalah rasa curiga dan “terganggu” terhadap orang asing. Pekerja sosial atau pendamping sosial yang akan memfasilitasi program pemberdayaan tentu akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas. Di samping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.

7.2.15 Kritik terhadap pemberian bantuan

Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur dapat

berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon dan sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia. Modal fisik tidak dapat digunakan apabila tidak ada modal manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa penjelasan mengenai kendala dalam program pemberdayaan, perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu program pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul. Ada faktor-faktor kendala yang relatif mudah untuk diatasi namun ada beberapa faktor yang cukup sulit untuk diubah, misalnya faktor kendala yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh, upacara perkawinan atau kematian yang memerlukan biaya besar untuk penyelenggaraannya tidak bisa dengan mudah dikurangi dari adat istiadat komunitas karena upacara tersebut dianggap sebagai ritual yang sakral dan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, cara yang paling tepat adalah dengan melakukan pengkajian awal atau studi kelayakan terhadap komunitas (Pendidikan, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini, L. M. (2016) *Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan*.
- Koentjaraningrat (2013) *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: rineka Cipta.
- Pendidikan, N.-S. I. (2022) "Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong terhadap Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Desa." jakarta.
- Syaifuddin, Su, F. (2017) *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Diedit oleh Yusra. Aceh: Bandar Publishing.

BAB 8

PROSES PERUBAHAN DI MASYARAKAT

Oleh Mahaza

8.1 Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang berakal dan perilaku. Entitas dan pengaruh manusia bisa dilihat dari perilakunya sehari-hari. Perilaku manusia akan berubah seiring berjalannya waktu, sehingga contoh perubahan perilaku manusia dari waktu ke waktu memang nyata adanya. Artikel ini akan menyajikan contoh-contoh tersebut serta teori-teori yang menyangkut tentang perubahan perilaku manusia.

Menurut Atkinson (1987), perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat seseorang berbeda dengan sebelumnya. Menurut Rogers, perubahan dapat terjadi tergantung dari lima faktor yang menyebabkannya, yaitu: Perubahan harus mempunyai suatu keuntungan. Perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kompleksitas, Dapat dibagi, Dapat dikomunikasikan

Menurut Skinner dalam Notoatmojo (1993), perilaku merupakan hasil atau respon atas stimulus atau dorongan terhadap diri seseorang. Perilaku tersebut terdiri atas tiga bentuk, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif adalah perilaku yang berdasarkan pola pikir seseorang. Sementara itu, afektif adalah perilaku yang tercermin dari sikapnya sehari-hari. Psikomotor merupakan perilaku yang berdasarkan pada tindakan. Perilaku seseorang dapat dikategorikan ke dalam perilaku manusia dan perilaku sosial.

Perilaku manusia dikelompokkan menjadi perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang yang terjadi akibat faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Semua perilaku manusia itu dipelajari dalam antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan

kedokteran. Perilaku sosial adalah perilaku yang ditujukan khusus untuk orang lain. Meskipun dalam kondisi sosial yang sama, seseorang akan bertindak dengan cara mereka masing-masing. Hal ini merupakan cerminan dari sifat manusia yang unik dan terbawa ke dalam suasana tertentu, serta ditunjukkan ke lingkungan atau kondisi sosial yang ada. Perilaku sosial yang dilakukan oleh individu masyarakat dapat dilihat dari berbagai kecenderungan perilaku manusia, seperti kecenderungan akan peranan, kecenderungan sosiometrik, dan kecenderungan ekspresi.

Perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami manusia berdasarkan apa yang telah dipelajari, entah itu dari peran pranata keluarga, teman, lingkungan, atau dari diri mereka sendiri. Proses perubahan tersebut sangat ditentukan oleh kondisi dan kebutuhan orang tersebut. Perubahan perilaku mempunyai tiga bentuk, yaitu:

8.2 Bentuk Perubahan dalam Masyarakat

1. **Perubahan alamiah (*natural change*):** perubahan perilaku ini terjadi secara alamiah dalam diri manusia. Contoh: perubahan fisik dari muda ke tua.
2. **Perubahan terencana (*planned change*):** perubahan perilaku yang memang sudah direncanakan oleh orang tersebut. Contoh: seseorang pengangguran yang ingin merubah nasibnya dengan berwirausaha agar mendapat penghidupan yang layak.
3. **Kesiapan perubahan (*readiness to change*):** perubahan perilaku yang terjadi karena adanya proses internal (*readiness*) pada diri seseorang. Proses internal pada diri seseorang sangatlah variatif.
Perubahan yang terjadi terutama pada perubahan terencana dan kesiapan perubahan tentu terjadi dengan sejumlah strategi. Di bawah ini terdapat strategi-strategi yang dilakukan dalam perubahan perilaku:
 - a. ***Inforcement*:** strategi perubahan ini dilakukan dengan cara paksaan dengan menggunakan peraturan atau perundang-undangan yang diberlakukan. Strategi ini

dapat menghasilkan perubahan perilaku yang cepat namun tidak berlangsung lama.

- b. **Education:** strategi perubahan perilaku ini dilakukan dengan pemberian pengajaran, informasi, atau penyuluhan. Pelaksanaan strategi ini memakan waktu yang cukup banyak namun dapat menghasilkan perubahan perilaku yang tahan lama. Tak hanya strategi, perubahan perilaku pun mesti dilakukan dengan sejumlah cara, yaitu:
- Mengeluarkan instruksi, aturan, dan ancaman yang sifatnya memaksa.
 - Menakut-nakuti bahaya atau dampak yang ditimbulkan akibat melanggar aturan yang diberlakukan.
 - Memberi imbalan atas apa yang telah dilakukan atau atas ketaatan akan aturan. Imbalan bisa berupa pujian atau pun hadiah.
 - Membina hubungan baik dengan orang lain.
 - Memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang lain.
 - Memberikan kemudahan fasilitas dan akses.
 - Menanamkan kesadaran dan menumbuhkan motivasi.

8.3 Macam-macam Perubahan Masyarakat

Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sistem, dan perilaku manusia. Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial sangat berkaitan dengan perubahan perilaku manusia. Perubahan sosial bersifat terikat dan saling terhubung antara satu unsur dengan satu unsur lainnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial adalah sebagai berikut:

a. **Perubahan Evolusi**

Bentuk perubahan sosial ini terjadi secara lambat dan membutuhkan proses yang tidaklah instan. Selain itu, perubahan ini terjadi tanpa adanya kehendak dari masyarakat yang mengalami perubahan. Proses perubahan

ini dilalui masyarakat dengan mengikuti perkembangan sekitar dalam upayanya memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. **Perubahan Revolusi**

Kebalikan dari perubahan evolusi, perubahan revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dan tidak dikehendaki atau direncanakan sebelumnya. Meskipun begitu, perubahan revolusi juga bisa terjadi secara terencana. Ketegangan atau bentuk-bentuk konflik sosial sering terjadi di lingkungan masyarakat saat revolusi dilakukan. Secara sosiologis, perubahan revolusi dapat terjadi jika telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- Adanya keinginan masyarakat secara umum untuk mengadakan perubahan.
- Adanya seorang pemimpin atau segolongan orang yang memimpin masyarakat menuju perubahan tersebut.
- Pemimpin tersebut mampu menampung aspirasi masyarakat guna terbentuknya perubahan revolusi tersebut. Nantinya, aspirasi itu akan dibentuk menjadi program atau rencana untuk mewujudkan revolusi yang diinginkan.
- Pemimpin masyarakat tersebut mampu memberikan tujuan yang konkret dan jelas kepada masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin tersebut juga harus membuat suatu rumusan ideologis dalam mewujudkan perubahan yang dikehendaki.
- Harus mengetahui momentum yang tepat untuk melakukan perubahan revolusi. Momen yang tepat tersebut biasanya terjadi saat kondisi masyarakat sudah tidak menentu dan diperlukan adanya perubahan secara revolusi. Jika tidak mengetahui momentum tersebut, maka perubahan revolusi akan sulit terlaksana.

c. **Perubahan yang Direncanakan**

Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan sosial yang telah dirancang terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan tersebut. Pihak-pihak ini biasanya disebut sebagai *agent of change*.

Perubahan sosial yang direncanakan bisa disebut juga sebagai perubahan yang dikehendaki.

d. **Perubahan yang Tidak Direncanakan**

Perubahan sosial ini terjadi di luar jangkauan atau perkiraan masyarakat. Dampak dari perubahan ini bisa membawa masalah atau kendala bagi masyarakat. Terjadinya bencana alam di Indonesia adalah salah satu contoh dari perubahan sosial ini.

e. **Perubahan yang Berpengaruh Besar**

Perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan yang berpengaruh besar jika pengaruh itu berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, baik itu terhadap struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi sosial.

g. **Perubahan yang Berpengaruh Kecil**

Perubahan sosial yang berpengaruh kecil merupakan pengaruh yang tidak berdampak langsung bagi seluruh masyarakat. Perubahan ini hanya terjadi pada beberapa kelompok masyarakat tertentu. Mode rambut dan pakaian adalah beberapa contoh diantaranya.

8.4 Faktor-Faktor Perubahan Perilaku

Seperti halnya perilaku manusia, perilaku sosial juga dipelajari di berbagai Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni: sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, ilmu hukum, ilmu politik, dan psikologi. Perubahan perilaku pada diri manusia didukung oleh sejumlah faktor, yaitu:

a. **Faktor Internal**

Perilaku manusia merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki manusia akibat dari pengaruh sikap, emosi, adat istiadat, etika, genetika, kekuasaan, dan persuasi atau bujukan. Faktor perubahan perilaku ini terjadi di dalam diri manusia, dimana bentuk-bentuk faktor internal tersebut antara lain:

- Jenis ras/keturunan
- Jenis kelamin
- Sifat fisik
- Kepribadian

- Intelegensia
- Bakat

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor pemicu perubahan perilaku manusia yang terjadi di luar diri manusia, diantaranya:

- Pendidikan
- Agama
- Kebudayaan
- Lingkungan
- Sosial ekonomi

Seperti yang telah disebutkan, bahwa contoh perubahan perilaku manusia dari waktu ke waktu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contoh tersebut ialah:

- Perubahan perilaku manusia dari segi ekonomi, seperti sistem pembayaran manusia yang semula menggunakan metode barter perlahan-lahan berganti dengan sistem berbayar dengan uang.
- Perubahan perilaku manusia dari segi berbelanja, dari yang semula berbelanja di pasar lalu perlahan berganti menjadi berbelanja di pasar swalayan atau supermarket.
- Perubahan perilaku manusia dari segi sosial, dimana manusia awalnya adalah makhluk nomaden yang perlahan-lahan berubah menjadi manusia yang menetap di satu daerah tertentu.
- Masyarakat yang semula selalu bergotong royong berubah menjadi masyarakat individualistis.
- Masyarakat yang semula berkomunikasi secara langsung perlahan-lahan berubah menjadi masyarakat yang berkomunikasi lewat media sosial.
- Perubahan dari segi politik, dari yang semula otoriter berubah menjadi demokratis.
- Dahulu manusia sangat percaya akan adanya mitos, sekarang pelan-pelan mitos mulai ditampik dan kini manusia lebih mengandalkan rasionalitas mereka.
- Manusia yang semula hidup bersahaja kini berubah menjadi manusia yang matrealistis dan terlalu mendambakan kekayaan.

- Masyarakat yang semula bekerja di sektor pertanian perlahan-lahan mulai bekerja di sektor perindustrian.
- Dahulu, orang-orang begitu mendambakan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Kini, pekerjaan tersebut sudah tidak terlalu didambakan. Sebab, orang-orang kini banyak bekerja di sektor industri dan bekerja di bawah pihak swasta. Selain itu, profesi pengusaha kini menjadi idaman semua orang.
- Masyarakat zaman dahulu menganggap bahwa bekerja di dunia seni dan penulisan bukanlah suatu pekerjaan yang layak. Bahkan, bekerja di dua dunia tersebut hanya dianggap sebagai hobi dan dianggap tidak mampu menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan pribadi. Namun, pekerjaan-pekerjaan tersebut kini dianggap lazim dan menjanjikan. Tak jarang, orang yang berprofesi di bidang-bidang tersebut mempunyai penghasilan yang jauh lebih tinggi dibanding pekerjaan-pekerjaan konvensional lainnya.
- Wanita pada zaman dahulu dilarang untuk bersekolah tinggi dan mengerjakan pekerjaan lelaki. Sekarang, sudah cukup banyak perempuan yang bersekolah hingga ke jenjang doktoral dan banyak juga yang bekerja di bidang pekerjaan yang dilakukan lelaki, seperti sopir, pengacara, politisi, dan presiden.
- Di zaman dahulu, orang-orang biasanya memamerkan harta, jabatan, atau prestasi ke orang-orang secara langsung. Di zaman sekarang, orang bisa memamerkan apa saja, mulai dari harta sampai makanan yang sedang mereka makan. Semua itu kini tidak dipamerkan secara langsung, melainkan melalui media sosial yang kini kian menjamur.

Perubahan kebudayaan merupakan cara baru dalam upaya perbaikan terhadap bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Perubahan kebudayaan mencakup berbagai hal mulai dari kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan sistem kemasyarakatan. Para ahli mengemukakan pendapat mengenai

pengertian perubahan kebudayaan. Berikut ini pengertian perubahan kebudayaan menurut para ahli.

a. **Samuel Koenig**

Samuel Koenig mengemukakan pendapatnya bahwa perubahan kebudayaan yaitu suatu cara untuk memodifikasi hal yang ada pada pola-pola kehidupan manusia. Adapun terjadinya sebuah modifikasi disebabkan karena faktor internal maupun eksternal.

b. **Selo Soemardjan**

Selo Soemardjan mengemukakan pendapatnya bahwa perubahan kebudayaan adalah semua perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan yang dapat mempengaruhi suatu sistem sosial, baik itu sikap, nilai-nilai, maupun pola perilaku seseorang yang ada diantara kelompok dalam masyarakat.

c. **John Lewin Gillin dan John Philip Gillin**

Menurut John Lewin Gillin dan John Phillip Gillin, perubahan kebudayaan adalah cara hidup yang bervariasi yang terjadi karena disebabkan oleh perubahan kondisi geografis termasuk ideologi, komposisi penduduk.

Itulah pengertian perubahan kebudayaan secara umum dan menurut para ahli. Perubahan kebudayaan terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor. Pembahasan selanjutnya faktor yang mendorong terjadinya perubahan kebudayaan.

8.5 Faktor Terjadinya Perubahan Kebudayaan

Terjadinya perubahan kebudayaan tentunya disebabkan karena ada faktor yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan meliputi faktor internal dan juga eksternal. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai faktor internal dan juga faktor eksternal terjadinya perubahan kebudayaan.

Faktor internal terjadinya perubahan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan demografis. Perubahan itu mencakup perubahan ukuran struktur, dan juga distribusi penduduk.

Contoh dari perubahan demografis yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. (baca juga: Perkembangan Wilayah Indonesia)

2. Adanya penemuan baru baik itu ide ataupun alat, atau dapat juga menyempurnakan penemuan baru tersebut dan memperbaharui ataupun mengganti yang ada.
3. Adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Dengan adanya konflik sosial maka dapat merubah suatu kepribadian orang yang ada pada bagian masyarakat tersebut. Contohnya seseorang yang tiba-tiba menjadi pendiam, tidak mau bersosialisasi dengan orang lain.
4. Adanya pemberontakan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan kebudayaan pada struktur pemerintahan. (baca juga: Faktor perubahan Sosial)

Faktor eksternal terjadinya perubahan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1. Terjadinya peperangan merupakan faktor eksternal terjadinya perubahan kebudayaan. Dengan adanya peperangan maka akan terjadi perubahan unsur-unsur budaya pada suatu negara baik dalam unsur ekonomi, sistem pengetahuan, teknologi, bahasa, kesenian ataupun sistem kemasyarakatan. (baca juga: Perkembangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia)
2. Faktor eksternal kedua yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan yaitu adanya pengaruh budaya lain. Adanya pengaruh budaya lain biasanya lebih mudah terjadi pada masyarakat yang terbuka, karena masyarakat terbuka dapat lebih mudah menerima adanya unsur budaya lain. Contoh dari adanya pengaruh budaya lain yaitu adanya hubungan antara dua bangsa yang dapat saling mempengaruhi seperti terjadinya akulturasi, difusi (penyebaran kebudayaan). dan juga proses bertemunya antar budaya yang menghasilkan suatu budaya baru akan tetapi tidak melihat budaya lama (Asimilasi).
3. Terjadinya perubahan alam dapat mempengaruhi juga perubahan kebudayaan. Maksud dari perubahan alam yaitu perubahan lingkungan fisik yang disebabkan karena

bencana alam misalkan gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dll. Dengan terjadinya suatu bencana alam maka akan terjadi banyak perubahan pada kehidupan seperti perpindahan tempat tinggal maka mau tidak mau mereka harus saling menyesuaikan hal tersebut memicu terjadinya perubahan

4. Seperti yang telah dibahas pada materi sebelumnya, bahwa budaya memiliki unsur-unsur universal. Tentunya dengan adanya perubahan kebudayaan akan membuat perubahan pada unsur.

8.6 Contoh perubahan yang terjadi pada Masyarakat yaitu sebagai berikut.

a. Religi (Sistem Kepercayaan)

Sistem kepercayaan merupakan sistem keyakinan ataupun gagasan tentang Tuhan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya bahwa sistem kepercayaan pun mengalami evolusi. Contohnya yaitu pada awalnya terdapat keyakinan terhadap roh-roh atau animisme, namun dengan adanya evolusi maka muncullah keyakinan akan adanya banyak dewa atau politeisme. Dan pada evolusi terakhir muncul suatu keyakinan bahwa adanya satu tuhan atau monoteisme. Contohnya menganut agama Islam dan menganut agama Kristen.

c. Sistem Pengetahuan

Suatu masyarakat tidak akan bisa hidup tanpa adanya pengetahuan. Pada setiap kebudayaan akan terdapat suatu pengetahuan baik itu tentang alam, zat-zat, benda, ataupun yang lainnya. Contoh perubahan kebudayaan pada unsur sistem pengetahuan yaitu adanya kepercayaan manusia zaman dahulu bahwa bumi itu datar. Namun dengan adanya evolusi maka dilakukan berbagai pengamatan dan juga penelitian yang pada akhirnya seorang nelayan berpikiran bahwa bumi itu bulat. Seiring berkembangnya zaman muncul ilmu astronomi yang bisa pergi ke luar angkasa, sehingga manusia mulai yakin bahwa bumi berbentuk bulat.

d. **Sistem Kemasyarakatan**

Salah satu unsur kebudayaan yang pasti akan selalu berubah adalah sistem kemasyarakatan. Di dalam kehidupan masyarakat, setiap individu akan mengatur dirinya mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu sistem kemasyarakatan akan sering mengalami perubahan kebudayaan. (baca juga: [Macam-Macam Ras Di Indonesia](#))

e. **Bahasa**

Bahasa merupakan salah satu unsur yang akan selalu berubah sama halnya seperti sistem kemasyarakatan. Adanya perubahan dalam unsur bahasa sangat terlihat jelas. Contohnya yaitu pada masa prasejarah, manusia dapat menceritakan hal yang dialaminya hanya melalui lisan sedangkan pada masa sejarah manusia sudah mengenal tulisan sehingga dapat dilihat dari prasasti yang dimana pada prasasti itu termuat tulisan-tulisan.

f. **Kesenian**

Kesenian akan selalu mengalami perubahan. Hal yang mencakup kesenian yaitu seni musik, seni rupa ataupun seni tari. Dengan berkembang zaman fungsi seni pun dapat berubah, jika zaman dahulu seni hanya digunakan untuk mengekspresikan diri ataupun untuk kegiatan spiritual saat ini seni lebih banyak digunakan untuk tujuan politik ataupun untuk perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan. (1995). Pendidikan Anak Dalam Islam 2. Jakarta: Pustaka Amani.
- Alo Liliweri. (1997). Komunikasi Antarpribadi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dedy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmad. (2001). Komunikasi Antar Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- H.A Mustofa. (1997). Akhlak Tasawuf. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hafied Cangara. (1998). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Mafri Amir. (1999). Etika Komunikasi Masa Dalam Pandangan Islam. Jakarta: Logos.
- Onong Uchyana Effendy. (2001). Ilmu Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya. { 205 }
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/30/174210769/4-teori-perubahan-sosial-dan-contohnya?page=all>.
- <https://pkk.uma.ac.id/2021/11/17/perubahan-sosial..>
- <https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/pengertian..>

BAB 9

PERAN *CHANGE AGENT* DAN PEMIMPIN MASYARAKAT

Oleh Indah Wahyu Maesarini

9.1 Pendahuluan

9.1.1 Agen Perubahan (*Change Agent*) dan Pemimpin

1. Agen Perubahan

Agen perubahan (*change agent*) merupakan istilah yang dipopulerkan sebagai bagian dari keterlibatan seseorang dalam masyarakat untuk mengubah segala bentuk pemikiran, sikap dan tindakan melalui pengaruhnya kepada orang lain. Untuk menjadi agen perubahan dibutuhkan tidak sedikit pengaruhnya dalam masyarakat agar dapat merubah kondisi yang diinginkannya. Perubahan hanya akan terjadi manakala seseorang mempunyai kedudukan yang strategis dalam masyarakat, entah itu sebagai tokoh masyarakat, pemuka agama, pemerintah, birokrasi, akademisi, bahkan pengusaha yang bergerak di sektor swasta.

Dalam pemikirannya (Wibowo, 2006) mendeskripsikan agen perubahan sebagai orang yang melakukan perubahan dengan menjalankan fungsi manajemen dalam masyarakat. Senada dengan Wibowo, (Yusnitasari, 2021) menjabarkan agen perubahan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah bahwa birokrasi di dalam kedudukannya baik di pemerintah maupun masyarakat harus dapat menjadi panutan yang baik serta dapat melakukan perubahan untuk mewujudkan reformasi di tubuh pemerintahan. Dengan kata lain agen perubahan dapat terjadi di segala sektor, sehingga agen perubahan bisa dimungkinkan untuk dilakukan banyak pribadi yang terlibat dalam sebuah kegiatan kemasyarakatan dengan kedudukan, jabatan, dan status yang dimilikinya untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik serta dapat

mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang dilakukan sepanjang itu bermanfaat buat organisasi ataupun masyarakat banyak.

Didalam pemerintahan sendiri, agen perubahan disematkan kepada upaya melakukan reformasi birokrasi. Konsep reformasi birokrasi sendiri menempatkan perubahan pemikiran ke arah pelayanan, perubahan budaya kerja menjadi etos kerja tinggi bertarget kinerja serta berintegritas tinggi. Untuk dapat mewujudkan reformasi birokrasi masing-masing individu birokrasi harus memberikan contoh sebagai garda terdepan yang melakukan perubahan-perubahan tersebut.

2. Pemimpin

Seorang pemimpin memiliki peran besar dalam melakukan perubahan. Dengan kepemimpinannya akan dapat mempengaruhi bawahannya atas keputusan-keputusan yang dibuatnya. Komitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ditunjang dengan upaya untuk mensejahterahkan masyarakat maka seorang pemimpin akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut baik itu menyangkut kepada institusi pemerintahan maupun perusahaan serta organisasi non profit atau yang kita kenal dengan lembaga swadaya masyarakat.

Pemimpin sebuah negara dapat melakukan perubahan negaranya bagi kepentingan masyarakat bila komitmen reformasi birokrasi dilakukan di segala lini atau tingkatan dalam struktur organisasi pemerintahan. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepolisian, TNI, Kepala Daerah menjadikan momentum reformasi birokrasi sebagai perubahan fundamental bersama, berlaku di segala jabatan strategis. Pemimpin perusahaan akan melakukan inovasi dan kreativitas produk berupa barang dan jasa sebagai upaya perubahan karena didalam produknya terdapat upaya mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pola yang menjadi orientasi produknya. Organisasi non profit seperti lembaga swadaya masyarakat akan melakukan upaya-upaya perubahan pemikiran masyarakat akan pentingnya memperhatikan isu-isu tertentu dalam agenda nasional seperti kemiskinan, sampah, banjir, pengangguran, pendidikan, gender hingga alam dan air sebagai bahasan krisis dunia.

Dalam konteks pemikiran ahli, pemimpin dideskripsikan sebagai individu yang punya pengaruh dengan kepemimpinannya untuk menggerakkan sumber daya yang dimilikinya (Nenobais, 2020). Beberapa ahli pemikiran kepemimpinan membagi teori kepemimpinan dalam 5 kategori besar, diantaranya teori kepemimpinan sifat, teori kepemimpinan perilaku, teori kepemimpinan kekuatan-pengaruh, teori kepemimpinan situasional dan teori kepemimpinan integratif. Dasar teori kepemimpinan ini akan mempunyai tingkat keberhasilan tinggi bila digerakkan dengan penuh kesadaran dan komitmen sungguh-sungguh.

9.1.2 Peran Agen Perubahan Dan Pemimpin Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Memberdayakan masyarakat menjadi upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pada umumnya dengan segala keterbatasannya agar mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga masing-masing individu dapat menjalankan fungsi sosial yang ada

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah umumnya dilakukan melalui pengelolaan manajerialnya baik di dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya yang dimiliki seperti ekonomi, alam, dan manusia (masyarakat) yang pada akhirnya masyarakat akan memiliki kemampuan dan kemandirian baik secara ekonomi, ekologi dan sosial yang berkelanjutan

Beberapa peraturan perundang-undangan seperti GBHN 1999 yang menetapkan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat, UU No 22/1999 mendorong pemberdayaan masyarakat, dan UU No 25/2000 meningkatkan pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui memacu potensi masyarakat dengan melakukan daya guna kekuatannya serta upaya mengakui pemberdayaan masyarakat melalui kekuatan hukum yang mengikat (Noor, 2011)

9.2 Peran Nyata Pemerintah/Organisasi Masyarakat/Lembaga Masyarakat Pada Pemberdayaan Masyarakat

9.2.1 Pemerintah

Peran pemerintah sebagai agen perubahan dalam masyarakat bisa dilakukan melalui upaya pemilihan instrumen yang mendukung terciptanya iklim kondusif dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Kebijakan publik yang baik sejatinya hadir dalam mewakili kepentingan masyarakat sebagai bagian untuk memberikan solusi nyata akan perubahan yang ada. Rangkaian alternatif pilihan keputusan haruslah benar-benar diputuskan melalui keputusan musyawarah untuk mufakat, bukan kepentingan segelintir elit atau individu berkuasa dalam masyarakat untuk memuluskan kebijakan yang berpihak bagi kepentingan diri sendiri.

9.2.2 Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat menjadi tempat aspirasi masyarakat untuk menyampaikan pemikiran, harapan dan keinginan tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat akan menggerakkan organisasi kemasyarakatan yang membidangi kebutuhan ekonomi untuk menjadikan masyarakat sebagai mesin dari perubahan. Koperasi sebagai salah satu sendi ekonomi kerakyatan menjadi fondasi yang paling kuat untuk mengakomodir pemberdayaan ekonomi masyarakat.

9.2.3 Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat sebagai salah satu kreator terciptanya kepentingan masyarakat umumnya menjadi komunitas lokal yang dapat memperpanjang kepentingannya di dalam pemerintahan. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan perekonomian rakyat umumnya akan dilakukan oleh lembaga masyarakat yang menempatkan rakyat kecil seperti petani, industri rumah tangga bahkan pengusaha lokal komoditas daerah menjadi pihak-pihak yang akan mendapat perhatian lebih dari program pemerintah. Upaya yang dilakukan umumnya memobilisasi sumber daya ekonomi pemerintah melalui penyerapan program

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, tujuannya menuju kesejahteraan masyarakat.

9.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Agen Perubahan dan Kepemimpinan Publik Pemerintah

Untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat maka agen perubahan atau kepemimpinan publik pemerintah akan melakukan berbagai upaya berupa program kerja atau sasaran organisasi/lembaga/swastanisasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di bidang sosial kemasyarakatan dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta kehidupan sosialnya melalui terpenuhinya kebutuhan pelayanan.

Berikut beberapa contoh strategis yang dilakukan oleh agen perubahan dan pemimpin negara di dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat baik melalui organisasi pemerintahan/lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan

Tabel 1. Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Nama Program	Pelaksana	Tempat Pelaksanaan	Tahun	Hasil
1	Bantuan ekonomi dan pembangunan masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Mojokerto	2013	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
2	<i>Change and Development, Community Development and Community Empowerment, Pelayanan dan Advokasi</i>	Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES)	Nasional	Sejak 1971	Menampung aspirasi dan rangkaian bantuan swadaya masyarakat (rakyat miskin, bencana alam, korban perang, pelatihan pendidikan kepada masyarakat)
3	Pengawasan korupsi di institusi pemerintah	Indonesia Corruption Watch (ICW)	Nasional	Sejak 2010	Laporan audit independen ICW kepada masyarakat
4	Sosialisasi penyelenggaraan pemilu	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	Nasional	Setiap penyelenggaraan pemilu	Peningkatan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu

Sumber: Sosioglobal, Volume 1, Nomor 1, 2016, 49-67
JAP, Volume 1, Nomor 4, 2013, 9-14

9.4 Penutup

Agen perubahan secara garis besarnya bisa meliputi dari pribadi individu atau melibatkan kelompok kepentingan bahkan organisasi publik pemerintahan. Keberadaan agen perubahan sedikit banyak akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada masyarakat yang diberikan bantuan. Agen perubahan dapat menjadi pihak yang bisa mengubah bahkan mempengaruhi situasi dan kondisi yang ada. Dibeberapa lembaga atau organisasi kemasyarakatan agen perubahan memiliki sumbangan nyata dengan melakukan gerakan perubahan berupa inovasi dan kreativitas melalui upaya-upaya-upayanya.

Pemimpin dalam sebuah organisasi publik atau lembaga kemasyarakatan atau organisasi kemasyarakatan dapat menjadi

agen perubahan karena mempunyai andil besar untuk mengubah keadaan yang dihadapi masyarakat dengan kemampuan secara organisasionalnya menggerakkan sumber daya yang ada untuk mendukung suksesnya perubahan-perubahan yang ada. Menetapkan tujuan pada organisasi, mengambil keputusan akan kebijakan pada organisasi publiknya memungkinkan perubahan yang diinginkan dapat terealisasi dengan efisien dan efektif. Mesin penggerak perubahan turut serta andil dalam perubahan tersebut melalui sumber daya yang dimilikinya baik itu sarana prasarana, pembiayaan dalam pembangunan hingga tujuan tanggung jawab sosial korporasi dalam masyarakat menjadi bagian dari tuntutan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nenobais, H., 2020. *Servant Leadership*. 1 ed. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Noor, M., 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS*, 1(2), pp. 87-99.
- Wibowo, 2006. *Manajemen Perubahan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusnitasari, A., 2021. Kontribusi Agen Perubahan Birokrasi Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi: Studi Kasus Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun 2020. *Kewidyaiswaraan*, 6(1), pp. 81-91.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 tentang Penetapan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Undang-Undang Nomor 22/1999 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat
- Undang-Undang No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah

BAB 10

SWADAYA MASYARAKAT

Oleh Trisnani Dwi Hapsari

10.1 Pendahuluan

Swadaya merupakan suatu tindakan yang sukarela dilakukan oleh sekelompok orang atau perseorangan dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi atau kebutuhan secara individu atau bersama-sama. Pada kegiatan inisiatif swadaya terdapat kontribusi yang dominan dari sumber daya yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam kamus bahasa Indonesia, “Swadaya” berarti “kekuatan sendiri”, kekuatan sendiri berarti memiliki kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri. Secara tidak langsung, swadaya dapat dipahami sebagai individu atau kelompok masyarakat yang kekuatannya berasal dari masyarakat itu sendiri. Kekuatan ini bisa material atau immaterial. Materi berupa barang dan uang, sedangkan immaterial dapat berupa tenaga, pikiran, dan saran.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang membentuk kelompok yang bekerja sama hidup dan hidup cukup lama sehingga menjadikan kelompok tersebut dapat menganggap dan mengatur dirinya sebagai unit sosial dengan garis atau batas-batas yang jelas (Bungin, 2008).

Dari kedua pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa swadaya masyarakat merupakan satu tindakan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu cita-cita atau keinginan, dengan menggunakan sumber daya yang ada hingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Marbun (2008), yang menyatakan bahwa swadaya masyarakat merupakan kemampuan masyarakat di suatu daerah atau wilayah yang hampir semua masyarakatnya sanggup mencukupi akan keinginannya dengan mengadakannya sendiri. Pengertian ini tentu menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam setiap bagian atau turut serta dalam menyumbangkan pikiran dan tenaga ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan diri sendiri atau pribadi yang lebih dari pada

sekedar kegiatan fisik semata. Menurut Yeni et al. (2018), swadaya masyarakat sebagai modal utama bagi upaya pencapaian tujuan program pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan tidak hanya bertumpu kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga pada upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berswadaya dalam pelaksanaan program pembangunan.

10.2 Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih (Lesmana, 2021), dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan yang jelas, teridentifikasi melalui nama atau identitas lainnya.
2. Adanya kesadaran untuk berkelompok, dimana semua anggota merasa bahwa mereka merupakan sebuah kelompok dan ada orang lain di luar mereka, serta memiliki kesatuan persepsi tentang kelompok.
3. Adanya perasaan mengenai kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan.
4. Saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, artinya setiap anggota saling memerlukan bantuan anggota lainnya untuk mencapai tujuan yang membuat mereka bisa menyatu dalam kelompok.
5. Terjadi interaksi, dimana setiap anggota saling mengkomunikasikan, mempengaruhi dan bereaksi terhadap anggota lain.
6. Kemampuan untuk bertindak dengan cara tertentu yang telah disepakati, artinya kelompok sudah merupakan satu kesatuan organisasi yang tunggal dalam pencapaian tujuan kelompok.

Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan sekumpulan orang atau masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam suatu kelompok dikarenakan adanya suatu ikatan

pemersatu. Ikatan pemersatu tersebut bisa saja adanya kepentingan atau kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama (Djonet, 2018).

10.2.1 Peran Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat adalah bagian integral dari lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya berorientasi pada penanggulangan permasalahan dalam kelompok masyarakat. Menurut Ma'ruf (2011), kelompok Swadaya Masyarakat mempunyai peranan sebagai:

1. Sarana proses perubahan sosial, terutama dinamika perubahan cara berpikir (pola), pengamalan nilai-nilai baru, cara pandang baru dan pelebagaan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
2. Wadah pembahasan dan pemecahan masalah, termasuk pemecahan masalah berbasis konsensus umum;
3. Wadah aspirasi yaitu dengan menerima, mendiskusikan dan menyampaikan keinginan masing-masing anggota;
4. wadah untuk membangun kepercayaan dalam rangka membangun hubungan baik dengan pihak lain;
5. Sumber ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan yang lainnya.

Substansi dalam pembentukan Kelompok Swadaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan menghadapi banyak masalah yang berbeda, tidak semuanya dapat diselesaikan secara individu, biasanya ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan bersama. Ketika masalah terpecahkan, banyak orang dapat memunculkan banyak ide, sehingga akan memiliki banyak alternatif. Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa warga masyarakat pada dasarnya memiliki niat baik untuk saling membantu. Lebih lanjut, setiap orang pada dasarnya memiliki motivasi, pengalaman, dan potensi berbeda yang umumnya belum tergali dan dimanfaatkan secara optimal. Jika hal-hal tersebut disatukan dalam satu ikatan kelompok, maka akan menjadi kekuatan besar yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Diibaratkan sebagai air, jika satu tetes saja, potensi dan manfaatnya sangatlah kecil. Tetapi ketika sejumlah

tetesan tersebut berkumpul dan menjadi sumber mata air atau lautan, maka menjadi banyak manfaat.

10.2.2 Syarat dan Ciri Kelompok Swadaya Masyarakat

KSM terbentuk dari adanya sekelompok orang yang saling mengenal dan bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Terbentuknya KSM terjadi jika syarat-syarat berikut dipenuhi (Nadhir, 2009), yaitu:

1. Adanya ikatan pemersatu, seperti misalnya kesamaan tempat tinggal, kesamaan tempat pekerjaan, kesamaan jenis pekerjaan atau profesi, kesamaan hobi atau kesenangan, kesamaan organisasi/paguyuban
2. Adanya kesamaan kebutuhan ekonomi dan tujuan tertentu, seperti kebutuhan modal usaha, kebutuhan bahan baku atau barang dagangan tertentu, kebutuhan sarana tempat usaha, kebutuhan kelancaran penjualan barang produksi/jasa.
3. Adanya pemrakarsa atau kelompok kecil orang yang memiliki peranan/berpengaruh dan dipercaya orang lain disekelilingnya.
4. Ada orang yang dengan sukarela bersedia mengelola dan melakukan kegiatan pelayanan kepada para anggota.
5. Ada lembaga maupun perorangan yang memberikan bimbingan dalam pengembangan program kegiatan kepada kelompok.

Ciri utama Kelompok Swadaya Masyarakat, antara lain (AKPPI, 2014):

- a. Dibangun atas dasar motif sosial, meskipun untuk membela kepentingan ekonomi maupun politik anggota.
- b. Anggota adalah pelaku langsung yang memegang kedaulatan tertinggi.
- c. organisasi bersifat terbuka meskipun ada persyaratan tertentu untuk menjadi anggota.
- d. Anggota memiliki kemauan untuk menanggung resiko bersama atas dasar kesepakatan.
- e. Melembaga, artinya terdapat struktur dan aturan main yang dibentuk, disepakati dan dilaksanakan oleh anggota.

10.3 Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat

Kelompok Swadaya Masyarakat tidak selalu harus dibentuk baru, tetapi bisa dengan mengembangkan kelompok-kelompok yang sudah ada dan mengakar di masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pembangunan, dan lain-lain. Tujuan dan kegiatan kelompok-kelompok ini diarahkan pada pencegahan permasalahan yang sama. Mengikuti contoh LSM yang bergerak dalam penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, maka harus dipastikan bahwa masyarakat kurang mampu (miskin) terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima manfaat utama dan menjadi kelompok sasaran. Manfaat yang diterima dapat berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan kualitas hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, pemukiman dan lain-lain. Dalam proses pembentukan kelompok yang sudah ada dan berkembang di masyarakat tentunya harus dilakukan langkah-langkah agar kelompok tersebut benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu.

Apabila tidak ada kelompok masyarakat yang ada dan berkembang di suatu daerah, maka dapat dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang baru. Anggota masyarakat atau calon anggota Kelompok swadaya menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk membentuk Kelompok. Pertemuan tersebut didukung oleh Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau relawan. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat harus dilakukan dengan proses yang sejalan dengan konsep Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Substansi dasar dalam pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat adalah adanya kepentingan bersama, kebutuhan anggota akan mengikuti kelompok dan tujuan bersama. Kriteria keanggotaan, aturan dasar dan jenis kegiatan kelompok dapat dikembangkan secara mandiri melalui musyawarah antar anggota sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.

10.3.1 KSM Sebagai Sarana Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat (Soekanto dan Sulistyawati, 2013). Tekanan pada pengertian tersebut terletak pada keberadaan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang kemudian mempengaruhi segi struktur masyarakat lainnya.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan yang aktivitasnya berorientasi pada penanggulangan kemiskinan selalu berusaha mengadakan perubahan-perubahan pada masyarakat. Tujuan akhir dari perubahan tersebut adalah bagaimana masyarakat miskin bisa berdaya, dan pada akhirnya bisa mandiri. KSM sebagai agen of change menjadi pendorong terjadinya perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara pandang dan cara kerja baru, serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tugas dari Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu:

1. Memberikan kerangka acuan yang jelas, sebagai pegangan bagi anggotanya. Dengan kerangka pokok tersebut, dapat disusun skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi.
2. Memberikan kebebasan pada anggota dalam membuat keputusan. Setiap anggota KSM bebas mengajukan usul dan saran serta mengungkapkan pemikiran dan pendapat yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Memberikan kebebasan pada anggota dalam menetapkan kebutuhan serta masalah yang perlu dan dapat diatasi terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitas anggota, serta peningkatan dan penguatan tingkat kemampuan para anggota, seperti: peningkatan wawasan dan pengetahuan, peningkatan keterampilan serta peningkatan kesejahteraan, baik bersifat individu maupun kelompok.
4. Memberikan arahan dan peluang pada anggotanya untuk berpartisipasi nyata. Bahwa setiap anggota wajib

berkontribusi kepada kelompok sebagai wujud komitmen dalam rangka keswadayaan serta ikatan kelompok.

ii.

10.3.2 Kemandirian Kelompok Swadaya Masyarakat

Mewujudkan kemandirian dalam Kelompok Swadaya Masyarakat bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya atau langsung seperti barang jadi, tetapi merupakan hasil dari proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Proses pemberdayaan didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu kegiatan internal, eksternal, dan pendampingan.

1. Faktor Internal

Di dalam faktor internal, terdiri atas empat faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan kemandirian Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu anggota, pengurus, daftar kegiatan serta mekanisme kerja kegiatan.

- **Anggota**

Kelompok swadaya terbentuk ketika beberapa orang secara formal atau informal berkomitmen untuk bekerja sama dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat dapat mandiri jika individu-individu dalam kelompok tersebut memiliki kemampuan dan kapasitas untuk itu. Oleh karena itu, salah satu prasyarat kemandirian Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kualitas anggotanya yang memadai. Kualitas yang dimaksud menyangkut faktor-faktor seperti kedalaman pengetahuan, keluasan wawasan, kematangan mental, dan penguasaan keterampilan. Selain itu, berbagai eksperimen menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota suatu KSM, semakin kuat pula KSM tersebut. Ini karena semakin banyak sumber daya yang dapat dikumpulkan dan digunakan. Oleh karena itu, kemandirian KSM juga dapat dicapai dengan menambah jumlah anggota yang berkomitmen untuk berpartisipasi.

- **Pengurus**

Motor penggerak dari Kelompok Swadaya Masyarakat adalah pengurus. Hidup dan mati Kelompok Swadaya Masyarakat amat seringkali ditentukan oleh seberapa aktif pengurusnya. Upaya pembentukan

Kelompok Swadaya Masyarakat juga harus dengan meningkatkan kualitas pengurus. Pengurus harus memiliki komitmen yang tinggi, kapasitas manajemen yang sesuai, pemikiran yang terbuka, jaringan yang luas dan memiliki jiwa kepemimpinan.

- Kegiatan

Satu hal yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kemandirian Kelompok Swadaya Masyarakat, yakni memilih kegiatan yang tepat. Pengurus atau pendamping KSM sering mendengar keluhan bahwa meskipun dengan berbagai bentuk kegiatan kelompok tidak terus mandiri, nyatanya ketergantungan anggotanya semakin meningkat. Keluhan berasal dari kenyataan bahwa kegiatan dilakukan bukan untuk memenuhi kebutuhan aktual anggota tetapi hanya untuk mengejar tujuan kegiatan atau agenda. Jenis kegiatan ini jelas tidak akan menyatukan anggota dalam jangka panjang. Anggota tidak akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Oleh karena itu, kemandirian KSM akan sulit dicapai tanpa insentif yang tepat untuk membangun partisipasi.

- Mekanisme Kerja

Suatu Kelompok Swadaya Masyarakat dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien apabila memiliki mekanisme kerja yang jelas. Banyak orang setuju dengan hal tersebut, termasuk pengurus dan pendamping KSM. Namun, banyak praktik menunjukkan bahwa mekanisme kerja yang disiapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengurus yang kebingungan akan *jobdesk* yang dimilikinya, belum lagi anggotanya. Pada akhirnya, kelompok tersebut akan menemui jalan yang buntu. Pendamping dan pengurus perlu menentukan mekanisme kerja yang sesuai untuk kelompok. Sering ditemukan bahwa pengurus atau pendamping yang telah menerima pelatihan dalam manajemen modern hanya menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang berbeda untuk tim. Pada kenyataannya, prinsip-prinsip manajemen modern ini sering bermasalah karena tidak sesuai dengan tradisi, budaya, pengetahuan, dan kemampuan anggota. Berdasarkan pengalaman

tersebut, di awal pembentukan perlu disusun mekanisme kerja yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, kemampuan dan kebiasaan hidup para anggota. Pada tahap selanjutnya, mekanisme kerja yang baru selaras dengan tingkat perkembangan anggota dan kompleksitas pekerjaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern. Menurut Suprihanto (2018), mekanisme kerja suatu kelompok perlu ditetapkan, hal tersebut dilakukan agar lalu lintas informasi maupun pembagian *jobdesk* (deskripsi pekerjaan) dapat berjalan pada alur yang tepat dan sesuai.

2. Faktor Eksternal

Sebagai salah satu entitas dalam sosial-ekonomi, Kelompok Swadaya Masyarakat, pastinya akan terpengaruh oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi KSM secara signifikan adalah lingkungan sosial-ekonomi dan dukungan stakeholder.

- Lingkungan Sosial-ekonomi

Krisis multi aspek di Indonesia saat ini telah berdampak pada masyarakat luas, termasuk KSM. Saling tidak percaya dan curiga, akibat dari krisis sosial-politik yang lebih luas, telah mempengaruhi prinsip-prinsip dasar kelompok: kepercayaan dan keterbukaan. Akibatnya, KSM tidak hanya kesulitan dalam melakukan aktivitas tetapi juga dalam mempertahankan eksistensinya. Jelas bahwa lingkungan sosial ekonomi yang kondusif merupakan prasyarat bagi kemandirian suatu KSM. Kekuatan modal sosial bisa menjadi pelumas yang memperlancar kerja sama dan hubungan, sehingga harapan-harapan individu dapat tercapai secara efektif dan efisien.

- Dukungan stakeholder

Pengoptimalan peran dan dukungan stakeholder terkait dalam pengembangan kapasitas anggota KSM akan mempengaruhi bagaimana partisipasi anggota berlangsung. Identifikasi dan pemetaan stakeholder perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan menjalin keterlibatan dengan aktor-aktor yang tepat. Dukungan

stakeholder termasuk dukungan dari adanya agen perubah yang mendampingi atau memberdayakan kelompok, serta menghubungkan komunitas kelompok dengan pihak-pihak luar, untuk mendapatkan akses baik secara politik maupun ekonomi kepada pemerintah daerah, swasta, LSM dan sebagainya.

3. Faktor Pendampingan

Keberadaan KSM dalam proses penumbuhannya tidak lepas dari peran seorang sukarelawan yang membantu KSM agar tujuannya bisa tercapai. Seseorang tersebut ada yang dinamakan pembina, pendamping, kader, penggerak atau penyuluh. Sebagai agen pemberdayaan, tim pendampingan dalam menjalankan tugasnya bukanlah untuk menggurui masyarakat setempat, karena pada umumnya masyarakat tersebut telah mempunyai pengalaman dalam menjalankan kegiatannya. Namun demikian, masyarakat masih butuh bimbingan dalam bekerja untuk lebih meningkatkan kapasitas hidupnya. Tim pendamping berasal dari berbagai latar belakang pendidikan/ pengetahuan, pengalaman, keahlian dan lain sebagainya, mulai dari yang terkait dengan aspek teknis (sesuai dengan sumber daya yang dimiliki), aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya. Keberhasilan pendampingan ditandai dengan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam aspek peningkatan kapasitas, untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Anwas, 2014). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pendamping merupakan bagian dari komponen lembaga, instansi atau dunia usaha dalam proses peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat, maka pendamping mempunyai fungsi dan peran yaitu sebagai :

1. Fasilitator; seorang pendamping diharapkan dapat memobilisasi sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat serta sumberdaya disekitarnya, demi terciptanya situasi dan kondisi yang memungkinkan kelompok memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi yang mendominasi pengambilan keputusan.
2. Motivator; keberhasilan seorang pendamping banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memotivasi orang

maupun kelompok, untuk menggali potensi yang dimilikinya dan mengarahkan orang maupun kelompok tersebut untuk menggunakan potensi demi mencapai kesejahteraan bersama.

3. Penghubung (mediator); untuk menjembatani hubungan individu dengan kelompok, kelompok dan masyarakat. Maka seorang pendamping dituntut untuk dapat berperan aktif sebagai penghubung untuk mengakselerasi pencapaian tujuan. Sehingga terjalin kolaborasi/kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak-pihak tersebut.
4. Dinamisor; seorang pendamping wajib memiliki pola pikir pembaharu dalam upaya pengembangan masyarakat. Tidak mudah putus asa, memiliki imajinasi dan daya kreasi serta visioner (kemampuan memandang ke depan). Seorang yang dinamis memiliki dan mampu dalam penentuan kebijakan, langkah-langkah dan memiliki perencanaan yang mantap. Dengan keteguhan hati dan keyakinan ke arah kemajuan yang positif serta mampu menjadi penggerak dalam setiap kegiatan sehingga menimbulkan ketertarikan dan optimisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2013. Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 15-21.
- Marbun, B.N. 2008. *Proses Pembangunan Desa*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ma'ruf, M. M. 2011. Peranan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. *Jurnal Visioner*.5(4):1-10
- Bungin, B. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Discourse Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Kencana Prenada Media Group Jakarta. Jakarta
- Damsar, 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Djonet, S. 2018. *Penduduk Miskin Transient*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Yogyakarta
- Suprihanto, J. 2018. *Manajemen*. Gadjah Mada University Press. 187 hlm.
- Lesmana, G. 2021. *Dinamika Kelompok*. Modul Pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 29 hlm.
- Nadhir, M. 2009. *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*. Yapsem. 126 hlm.
- Soekanto, S. dan Sulistyowati, B. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres. 412 hlm.
- Sugiyanto dan L.B. Pintakami. 2021. *Dasar-dasar Komunikasi untuk Penyuluh Pertanian*. Universitas Brawijaya Press: Malang.
- Susetyo, D. P. B. 2021. *Dinamika Kelompok: Pendekatan Psikologi Sosial*. SCU Knowledge Media. 176 hlm.
- Verhagen, K., M. Keliat, dan Tanudi. 1996. *Pengembangan keswadayaan: Pengalaman LSM di tiga negara*. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara (Puspa Swara).
- Yeni, M., S. Yuliana, dan R. P. Yanti. 2018. Efektivitas Program Partisipatif Kelompok Perempuan dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat. *Jurnal Surya Masyarakat*. 1(1): 64-80.

BIODATA PENULIS



Hairudin La Patilaya, SKM. M.Kes.

Dosen tetap Yayasan Non-PNS di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat

Hairudin La Patilaya, SKM. M.Kes. di lahirkan di Desa Soligi, Kec.Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada tanggal 25 Juni 1982. Penulis memiliki istri bernama Sarifani, S.S, penulis dianugrahi 3 orang Putra yaitu M.Fa'iz Asyraf Patilaya, M.Fadhlun Azmi Patilaya, dan M.Farid Azzam Patilaya. Penulis Menempuh pendidikan SD Inpres Soligi lulus pada tahun 1994. Selanjutnya melanjutkan Studi pada SLTP Negeri 2 Obi kemudian lulus pada tahun 1997.

Penulis kemudian melanjutkan lagi Studi SMU Negeri 1 Pasarwajo dan lulus pada tahun 2000. Universitas Muhammadiyah Maluku Utara adalah Universitas yang dipilih untuk melanjutkan Studi S1 (SKM) pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Minat PKIP yang lulus pada tahun 2006. Penulis menempuh pendidikan S2 di Universitas Indonesia Timur di Makassar Program Pascasarjana S2 (M.Kes) Minat MARS dan lulus di tahun 2013.

Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen tetap Yayasan Non-PNS di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat sejak tahun 2007 sampai sekarang. Selain aktif sebagai Dosen penulis juga aktif melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi jurnal nasional dan internasional.

Penulis telah menghasilkan karya Buku Ajar dan beberapa Book Chapter. Pengalaman organisasi penulis diantaranya adalah sebagai Pengurus (PKBM) Rutan Ternate tahun 2007, menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Kesehatan Masyarakat tahun 2009-2013, Ketua Peminatan PKIP Fikes UMMU tahun 2014-Sekarang, penulis juga menjadi Pengurus PERSAKMI Provinsi Maluku Utara 2011-Sekarang, sebagai Pengurus Majelis Kesehatan Umum dan Pelayanan Sosial PWM Malut dari tahun 2015-Sekarang, Pergurus PPPKMI Cabang Provinsi Maluku Utara 2016-Sekarang, Pengurus IAKMI Provinsi Maluku Utara 2018-Sekarang, Pengurus FOKAL UMMU sebagai Sekretaris Jenderal tahun 2019-2023 dan juga sebagai Pengurus PJSI Provinsi Maluku Utara tahun 2019-2023.

Selain memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen, penulis juga memiliki pengalaman kerja Sebagai Assesor Badan Akreditasi Nasional S/M Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016 – 2019. Pendidikan non-formal yang pernah diikuti penulis adalah Pekerti Wilayah Kopertis XII tahun 2013, selain itu di tahun 2013 penulis mengikuti PEKERTI dan AA, serta kegiatan Program Magang Dosen di Universitas Airlangga Surabaya melalui Program Magang Dosen Kemendikbudristek.

BIODATA PENULIS



James Sinurat

Dosen Pascasarjana
Universitas Nusa Bangsa, Bogor

Penulis lahir di Lumbanpea, Tapanuli Utara, tanggal 26 Juni 1952. Penulis adalah Dosen Tetap Program Pascasarjana, Universitas Nusa Bangsa, Bogor. Penulis menyelesaikan pendidikan SD Negeri Lumbanrang, kemudian SMP Negeri Lumbanjulu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, selanjutnya SMA Negeri II Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor, tahun 1978, selanjutnya menyelesaikan pendidikan Strata 2 Virginia Commonwealth University (VCU), Amerika Serikat, atas biaya World Bank, dengan gelar Master of Urban and Regional Planning, tahun 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 3 Universitas Negeri Jakarta, tahun 2015, atas biaya sendiri.

Penulis telah menghasilkan tiga buku kolaborasi pada tahun 2022. Pertama, buku “Paradigma Agribisnis,” terbit Januari 2022; Kedua, buku “CSR Perusahaan,” terbit Februari 2022; Ketiga, buku “Manajemen Pariwisata,” terbit Maret 2022. Ketiga buku diterbitkan oleh Widina Bakti Persada Bandung, anggota IKAPI. Ketiga buku memiliki ISBN dan terindeks Googlescholar dan Google Books. Karya tulis lainnya berupa artikel yang terindeks Scopus ditulis bersama rekan dosen: (1) *Social Relation between Businessman and Community in Management of Intensive Shrimp Pond*, terbit tahun 2017; (2) *The Effect of Phosphate Enhanced Organic Matter on Fertility and Productivity of Latosol Soil, Bogor Regency*, terbit tahun

2021. (3) *Analysis of relationship between economic sectors of DKI Jakarta towards land use changes and erosion in Ciliwung Hulu Watershed, Bogor Regency*, terbit tahun 2022.

BIODATA PENULIS



Budi Sarasati, S.Km., M.Si

Dosen Tetap pada Jurusan Ilmu Psikologi
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Penulis lahir di Semarang, tanggal 20 Oktober 1967. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Beberapa karya Penulis antara lain : Pemuda Tangguh Indonesia sebagai book chapter dari buku Kesehatan Mental Perspektif Indonesia, book chapter; Sektor Sosial Budaya; Pengaruh Aksesibilitas Pada Perubahan Sosial Di Daerah Marginal Kampung Sungai Labuh yang terangkum dalam buku Dampak Perkembangan Transportasi Di Berbagai Sektor, book chapter Penyesuaian Diri Ibu Pada Pembelajaran Daring Di Daerah Perkampungan, yang terangkum dalam buku Perempuan Inspiratif Penjaga Negeri.

Tulisan adalah merupakan salah satu eksistensi kita, yang kelak akan diwariskan kepada generasi setelah kita. Oleh karena itu marilah berlomba-lomba menulis yang manfaat.

BIODATA PENULIS



Dr. Sri Jumiwati, S.P., M.Si
Staf Dosen Program Studi Agribisnis

Penulis lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah pada tanggal 17 Oktober 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Budidaya Pertanian fakultas Pertanian Universitas Tadulako (UNTAD) penentuan Palu dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Pengembangan Wilayah Pedesaan juga di UNTAD Palu kemudian menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Kehutanan di Universitas Mulawarman (UNMUL) Samarinda. Penulis adalah pengampu matakuliah Metode Penelitian dan Metode Penulisan Ilmiah pada Program Studi Agribisnis. Penulis menekuni bidang menulis untuk mendukung kewajiban penelitian dan publikasi dosen serta melakukan pengembangan kompetensi melalui Workshop dan Pelatihan terkait penelitian dan penulisan serta publikasi baik tingkat nasional maupun internasional.

BIODATA PENULIS



Asep Supriatna, M.Pd
Staf Dosen Jurusan PGMI

Penulis lahir di Subang tanggal 2 Maret 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi PGMI, STIT Rakeyan Santang Karawang. Menyelesaikan pendidikan S 1 pada PAI dan melanjutkan S2 pada Jurusan MPI. Penulis menekuni bidang Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan. Penulis juga sebagai tenaga pendidik di MTs Mifthul Huda Tegalwaru Karawang.
Email: aasepstea@gmail.com

BIODATA PENULIS



Budi Harto, S.E., M.M
Dosen Politeknik LP3I Bandung

Penulis sebelumnya telah bekerja di beberapa perusahaan swasta baik nasional maupun internasional dan sejak tahun 2014 bekerja sebagai dosen dan melakukan penelitian. Penulis merupakan dosen tetap di perguruan tinggi vokasi dan dosen tidak tetap di perguruan tinggi swasta di Bandung. Saat ini penulis sudah memiliki jabatan fungsional akademik lektor, alumni dari Program Studi Akuntansi (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (INABA), Program Magister Manajemen (S2) di Universitas Winayamukti dan sedang melanjutkan studi Pendidikan S3 Program Doktorat Ilmu Manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulis aktif sebagai pengelola jurnal riset akuntansi dan bisnis serta aktif dalam menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional serta menulis buku tentang pendidikan, manajemen sumber daya manusia, manajemen bisnis, dan lainnya. Selain itu pula penulis aktif sebagai pendamping UMKM dan pengelola Inkubator Bisnis Rumah Entrepreneur dengan membantu pendampingan bisnis UMKM dan mahasiswa yang berminat menjadi entrepreneur

BIODATA PENULIS



Urhuhe Dena Siburian

Penulis lahir di Batu Bara, 08-12-1972, menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Melanjutkan kuliah S1 dan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Medan jurusan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

BIODATA PENULIS



Mahaza, SKM. M.Kes

Dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan

Penulis lahir di Padang tanggal 23 Maret 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang. Menyelesaikan pendidikan D3 Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS Padang, Tahun 1994), Strata 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Baiturahmah Padang Tahun 2001 dan melanjutkan Strata2 pada Jurusan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM KM UI) Tahun 2009. Penulis menekuni bidang Kesehatan Lingkungan

BIODATA PENULIS



Indah Wahyu Maesarini, S. IP, M. Si

Dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami, Jakarta

Penulis lahir di Surabaya 30 April 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik di Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen Stiami, Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh Program Doktorat Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

Pengalaman manajemen pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi pada jenjang Program Sarjana di tahun 2009, Ketua Program Studi pada Program Sarjana di tahun 2010, Ketua Program Studi Pascasarjana di tahun 2015, Kepala Penjaminan Mutu Internal di tahun 2017-2021 dan saat ini masih ditugaskan sebagai Auditor Internal pada Satuan Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Institut Stiami.

BIODATA PENULIS



Trisnani Dwi Hapsari

Staf Dosen Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,
Undip

Penulis lahir di Semarang tanggal 04 Juli 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Institut Pertanian Bogor pada Tahun 2004 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Pantai, Universitas Diponegoro. Lulus pada Tahun 2010 dengan predikat cumlaude. Saat ini penulis sedang menempuh studi lanjut S3 pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Pesisir Universitas Diponegoro. Konsentrasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan yaitu terkait dengan bidang Sosial Ekonomi Perikanan, Manajemen Bisnis Perikanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.